

## **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan. Dimana Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 dirumuskan secara :

- a) transparan
- b) responsif
- c) efisien
- d) efektif
- e) akuntabel
- f) partisipatif
- g) terukur
- h) berkeadilan
- i) berwawasan lingkungan;
- j) berkelanjutan

Sementara itu penyusunan RKPD sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai arnanat tersebut maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2023 telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu I (satu) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana kerja Dinas Peikanan dan Peternakan tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Peikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Purwkarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Prioritas Pembangunan Daerah, yang mangatur pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya

juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah ;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta jangka pendek 1 (satu) tahun.
2. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perikanan dan Peternakan, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

4. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

### **1.3.1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Sebagai acuan Dinas Pertanian dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas dan Peternakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Proram dan Kegiatan

**BAB IV. PENUTUP**



**BAB. II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN**  
**PETERNAKAN TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan**

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan

Evaluasi merupakan tugas dari berbagai organisasi instansi pemerintah. Hal ini diasumsikan bahwa setiap instansi pemerintah mempunyai kebijakan - kebijakan, program - program dan kegiatan - kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka menjalankan misi maupun tugas pokok dan fungsi. Evaluasi yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan meliputi evaluasi kinerja keuangan dan evaluasi kinerja program/kegiatan.

***a. Evaluasi Kinerja Keuangan***

Alokasi APBD Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan (PAD) sebesar Rp. 216.041.000,- dan Belanja sebesar Rp. 15.811.717.311,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 9.164.860.476,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 6.646.856.835,-.

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber PAD Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2021 berasal dari retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan pasar-pelataran), retribusi jasa usaha (Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong), Retribusi Ijin usaha Perikanan, Retribusi ijin penjualan hasil perikanan. Secara keseluruhan realisasi pendapatan (PAD) Dinas Perikanan dan Peternakan sampai dengan Desember Tahun 2021 yaitu sebesar 62,33% dari target Rp. 346.609.000,-. Kontribusi terbesar pendapatan tersebut bersumber dari penjualan hasil perikanan sebesar 100,24% dari total realisasi PAD Tahun 2021. Target dan realisasi PAD secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
A	Hasil Retribusi Daerah	265.000.000,-	202.030.000,-	76,24
1.	Retribusi Jasa Umum	119.071.000,-	89.500.000,-	75,17
	Retribusi Pelayanan Pasar -Pelataran	119.071.000,-	89.500.000,-	75,17
2.	Retribusi Jasa Usaha	287.848.000,-	86.756.000,-	46,18
	Retribusi Rumah Potong Hewan	287.848.000,-	86.756.000,-	46,18
B	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.690.000,-	39.785.000,-	100,24
1.	Hasil Penjualan Aset daerah yang Tidak Dipisahkan	39.690.000,-	39.785.000,-	100,24
	Penjualan Hasil Perikanan	39.690.000,-	39.785.000,-	100,24
	<b>JUMLAH pendapatan</b>	<b>346.609.000,-</b>	<b>216.041.000,-</b>	<b>62,33</b>

## 2. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp. 9.164.860.476,- terealisasi sebesar Rp. 8.648.200.404,- (94,11%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Tabel 2. Jumlah dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2021.

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	<b>Belanja Pegawai :</b>			
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	9.164.860.476	8.648.200.404	94,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.164.860.476</b>	<b>8.648.200.404</b>	<b>94,25</b>

### 3. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung (BL) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp. 6.646.856.835,- terealisasi sebesar Rp. 6.540.743.009,- (91,94%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 31 kegiatan. Jumlah dan realisasi anggaran BL disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021.

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d. Bln Desember (Rp.)	Capaian (%)	Sumber Dana
1	2	4	5	6	3
<b>A.</b>	<b>Urusan : Wajib Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.765.210.817</b>	<b>10.873.973.061</b>		<b>APBD KAB</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.828.214</b>	<b>38.827.600</b>	<b>69,55</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.222.466	27.362.000	87,64	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.605.748	8.965.600	50,92	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	2.500.000	35,71	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.189.870.226</b>	<b>8.648.200.404</b>	<b>94,11</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.164.860.476	8.637.910.404	94,25	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.509.750	7.380.000	42,15	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000	2.910.000	38,80	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.525.384</b>	<b>9.091.300</b>	<b>95,44</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.591.384	4.591.300	100,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.934.000	4.500.000	91,20	
<b>4</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>387.909.936</b>	<b>352.726.577</b>	<b>90,93</b>	
	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.251	24.970.600	99,89	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.534.907	185.944.000	99,68	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.998.650	12.778.984	63,90	
	Penyediaan bahan logistik kantor	33.600.000	28.200.000	83,93	
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	40.019.104	33.783.400	84,42	
	Penyediaan Bahan Material	38.501.024	37.876.343	98,38	
	Fasiltasi Kunjungan Tamu	12.250.000	5.954.000	48,60	

1	2	4	5	6	3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.007.000	23.219.250	72,54	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0	-	
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74.273.857</b>	<b>35.228.776</b>	<b>47,43</b>	
	Pengadaan Mebel	20.946.960	20.946.960	100,00	
	Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya	52.626.897	14.281.816	27,14	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000	0	0,00	
<b>8</b>	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.370.739.200</b>	<b>1.275.621.204</b>	<b>93,06</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	252.019.200	173.800.948	68,96	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.113.720.000	1.096.820.256	98,48	
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>677.064.000</b>	<b>514.277.200</b>	<b>75,96</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	60.000.000	80,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.950.000	76.896.200	71,23	
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	0	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.300.000	65.050.000	86,39	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	413.814.000	312.331.000	75,48	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PRORAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.313.057.531</b>	<b>1.235.141.450</b>	<b>94,07</b>	
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>81.527.797</b>	<b>81.345.750</b>	<b>99,78</b>	
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	40.816.028	40.686.000	99,68	
	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	12.406.500	12.361.150	99,63	
	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	23.455.269	23.448.600	99,97	
	Pemberian pmdampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	4.850.000	4.850.000	100,00	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>	<b>1.231.529.734</b>	<b>1.153.795.700</b>	<b>93,69</b>	DAK

1	2	4	5	6	3
	Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	2.560.841	2.560.500	99,99	
	Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	913.000.000	861.523.400	94,36	
	Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	258.099.122	242.502.750	93,96	
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	35.478.353	32.098.650	90,47	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah	4.072.380	3.571.800	87,71	
	Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat				
	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	18.319.038	11.538.600	62,99	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>598.058.726</b>	<b>552.969.400</b>	<b>92,46</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>586.674.873</b>	<b>552.969.400</b>	<b>92,46</b>	
	Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	4.463.285	4.457.000	99,86	
	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	189.184.675	170.053.800	89,89	
	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	393.026.913	367.327.900	93,46	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.383.853</b>	<b>11.130.700</b>	<b>97,78</b>	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	445.500	325.500	73,06	
	Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	10.492.853	10.479.700	99,87	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha	445.500	325.500	73,06	
	<b>Urusan : Pilihan Bidang Urusan : Pertanian/Peternakan</b>				
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA SARANA PERTANIAN</b>	<b>636.831.774</b>	<b>522.663.500</b>	<b>82,07</b>	
<b>1</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>40.885.072</b>	<b>40.671.200</b>	<b>99,48</b>	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	40.885.072	40.671.200	99,48	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>188.344.841</b>	<b>135.026.000</b>	<b>71,69</b>	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	188.344.841	135.026.000	71,69	

1	2	4	5	6	3
4	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	6.373.306	6.121.150	96,04	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6.373.306	6.121.150	96,04	
5	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	12.244.957	12.244.800	100,00	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	12.244.957	12.244.800	100,00	
6	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84.253.148</b>	<b>51.256.550</b>	<b>60,84</b>	
	Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	37989656	20776600	54,69	
	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	22.041.123	19.880.100	90,20	
	Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak	24.222.369	10.599.850	43,76	
7	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>304.730.450</b>	<b>277.343.800</b>	95,21	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	283.099.942	269.540.800	95,21	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	21.630.508	7.803.000	36,07	
V	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>636.831.774</b>	<b>522.663.500</b>	<b>82,07</b>	
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>94.999.901</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1,84</b>	
	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	94.999.901	1.750.000	1,84	
VI	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.061.250.697</b>	<b>1.024.556.407</b>	<b>96,54</b>	
1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>157.832.474</b>	<b>156.620.600</b>	<b>99,23</b>	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis	157.012.474	155.800.600	99,23	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	820.000	820.000	100,00	
2	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>835.793.231</b>	<b>822.661.100</b>	<b>98,43</b>	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	800.894.637	787.771.700	98,36	
	Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeuaran Hewan dan Produk Hewan	33.945.062	33.935.900	99,97	

1	2	4	5	6	3
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	953.532	953.500	100,00	
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.610.000</b>	<b>12.610.000</b>	<b>100,00</b>	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	4.200.000	4.200.000	100,00	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	8.410.000	8.410.000	100,00	
<b>4</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>85.729.862</b>	<b>63.370.500</b>	<b>73,92</b>	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk hewan	14.066.553	13.931.000	99,04	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	71.094.731	49.439.500	69,54	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	568.578	0	0,00	
<b>5</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>3.230.192</b>	<b>3.230.107</b>	<b>100,00</b>	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3.230.192	3.230.107	100,00	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYULUH PERTANIAN</b>	<b>50.924.565</b>	<b>37.024.680</b>	<b>72,70</b>	
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>50.924.565</b>	<b>37.024.680</b>	<b>72,70</b>	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50.924.565	37.024.680	72,70	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>20.720.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>94,40</b>	
	<b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>20.720.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>94,40</b>	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10.360.000	10.030.000	96,81	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10.360.000	9.530.000	91,99	
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>236.718.238</b>	<b>235.373.750</b>	<b>99,43</b>	
<b>1</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>14.284.977</b>	<b>14.284.400</b>	<b>100,00</b>	
	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.284.977	14.284.400	100,00	
<b>2</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>				



1	2	4	5	6	3
	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	36.392.866	35.702.550	98,10	
<b>3</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>186.040.395</b>	<b>185.386.800</b>	<b>99,65</b>	
	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	186.040.395	185.386.800	99,65	

### ***b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021***

Pada tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 9 program dan 31 kegiatan. Realisasi capaian kinerja program/kegiatan yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel 5. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut ;

#### **1. Program Pengeloam Perikanan Budidaya**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.313.057.531,- terealisasi Rp. 1.235.141.450,- (94,07%). Terdapat 2 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan untuk mendukung program tersebut. Hasil kegiatan yang dicapai sebagai berikut :

- Terlaksananya pelatihan pemijahan ikan patin yang dilaksanakan kepada 30 kelompok pembudidaya ikan.
- Terlaksananya pelatihan budidaya ikan patin sebanyak 30 orang melalui metode praktikum secara langsung dilapangan (Hatchery BBI Cibogogirang) mulai dari seleksi induk, penyuntikan hormon HCG dan Ovaprim, pengurutan telur dan sperma ikan (stripping) sampai pada penebaran telur hasil pembuahan pada corong penetasan.
- Fasilitasi Pembentukan kelompok budidaya ikan sebanyak 3 kelompok di Desa Citamiang, Sinargalih dan Galumpit.

- ❑ Fasilitasi bantuan pembuatan akta notaris/Badan Hukum Kelompok Pembudidaya ikan sebanyak 10 Pokdakan.
- ❑ Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dan mendukung Program Citarum Harum terkait alih usaha KJA kepada 18 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang terdiri dari 9 Kelompok UPR, 2 Kelompok Ikan Hias dan 7 Kelompok budidaya pembesaran.
- ❑ Pelaksanaan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam bentuk pelayanan fasilitasi pengujian sampel ikan dan air pada kolam pembudidaya dan sampel pakan pada pelaku usaha pakan mandiri. sebanyak 6 sampel ikan dari 2 orang pembudidaya dan 5 sampel pakan dari 2 pelaku usaha.
- ❑ Fasilitasi pengurusan sertifikat Hak atas Tanah Pembudidaya ikan (Sehatkan) sebanyak 200 bidang, lokasi Desa Warungkadu 80 bidang dan Desa Margasari 120 Bidang.
- ❑ Bantuan Benih dan Pakan Ikan kepada 2 Pokdakan ikan lele masing-masing benih sebanyak 20.000 ekor dan pakan ikan 1.000 kg
- ❑ Bantuan paket Budidaya ikan dalam Ember (Budikdamber) kepada pendertia stunting yang tersebar di 3 Kecamatan dan 7 Desa dengan masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan paket budikdamber sebanyak 2 paket yang terdiri dari Ember modifikasi budikdamber 80 ltr 2 buah, benih lele 2 kg, pakan lele 6 kg, benih kangkung 2 bungkus, gelas plastik/net pot 12 buah, serokan ikan 1 buah.

- ❑ Bantuan paket Budikdamber untuk Program P2WKSS/Lomba Desa yang berlokasi di Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao sebanyak 50 Paket.
- ❑ Bantuan paket Budikdamber untuk Kampung KB Sumber Resmi Desa Karang Mukti dan Stimulan Pokdakan Putra Daerah Jaya masing-masing sebanyak 25 paket.

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini terdapat 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 598.058.726,- terealisasi sebesar Rp. 552.969.400,- (92,46%). Hasil kegiatan yang dicapai adalah sebagai berikut, Hasil kegiatan yang dicapai sebagai berikut :

- ❑ Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas nelayan dengan melaksanakan pelatihan perbengkelan mesin perahu, adapun narasumber dari kegiatan tersebut adalah tenaga ahli dari Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, yang diikuti oleh 4 kelompok nelayan dari kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukatani, kecamatan Jatiluhur dan kecamatan tegalwaru.
- ❑ Pengadaan sarana dan prasarana nelayan tangkap berupa coolbox sebanyak 12 buah, perahu nelayan sebanyak 3 unit dan jaring insang sebanyak 600 Pcs yang diberikan kepada Kelompok sebagai berikut ;

Tabel 4. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana nelayan tangkap tahun 2021

No	Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan			
			Perahu (unit)	Jaring Insang (pcs)	Cool box (bh)	Freezer (unit)
1.	Muara Cikanyayan Jaya	Ds. Sukasari Kec. Sukasari	1	245	3	-
2.	Ciputat Batu Peti	Ds. Kutamanah Kec. Sukasari	1	170	2	1
3.	Ciririp Liang Meong	Ds. Ciririp Kec. Sukasari	-	85	2	-
4.	Pelabuhan Biru Sejahtera	Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur	1	100	3	1
5.	Sakira Mandiri Jaya	Ds. Galumpit Kec. Tegalwaru	-	-	2	1
	<b>Total</b>		3	600	12	3

- ❑ Pelaksanaan pendataan potensi perikanan tangkap khususnya mengenai data potensi dan produksi perikanan tangkap tahun 2021.

Adapun hasil dari pendataan tersebut sebagai berikut ;

Tabel 5. Luas Potensi Perairan Umum Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Obyek	Luas Potensi (Ha)	Kecamatan
1.	Waduk	10,049.00	Jatiluhur, Sukasari, Sukatani, Tegalwaru, Maniis
2.	Genangan air lainnya (Situ, bekas Galian C dll)	222.00	Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta, Sukatani, Kiarapedes, Wanayasa, Pondoksalam
3.	Sungai	81.65	Jatiluhur, Tegalwaru, Babakancikao, Sukatani, Sukasari, Campaka, Cibatu, Purwakarta, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes, Plered, Darangdan, Bojong, Pasawahan, Maniis
	<b>Jumlah</b>	<b>10,352.65</b>	

- ❑ Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi tentang penebaran benih ikan (restocking) di perairan umum dan program Culture Based Fisheries (CBF) di 7 lokasi serta penebaran benih ikan sebanyak 954.700 ekor di Desa Sukasari, Desa Galumpit, Desa Tajursindang, Desa Kutamanah, Desa Jatimekar, Sungai Citarum dan sungai Wanayasa. Adapun jumlah dan jenis ikan yang ditebar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Penebaran Benih Ikan (Restocking) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

No	Nama Perairan Umum	Kelompok	Alamat	Jumlah Benih Ikan (Ekor)		
				Nilai	Patin	Kancra
1.	Waduk Jatiluhur, wilayah Ds. Sukasari	Muara Cikanyayan Jaya	Ds. Sukasari Kec. Sukasari	150.000		
2.	Waduk Jatiluhur, wilayah Ds. Galumpit	Sakira Mandiri Jaya	Ds. Galumpit Kec. Tegalwaru	200.000	32.500	
3.	Waduk Jatiluhur, wilayah Ds. Tajursindang	Hamparan Cipeundeuy Sukasari	Ds. Tajursindang Kec. Sukatani	150.000		
4.	Waduk Jatiluhur, wilayah Ds. Kutamanah	Ciputat Batu Peti	Ds. Kutamanah Kec. Sukasari	150.000	32.000	
5.	Waduk Jatiluhur, wilayah Ds. Jatimekar	Pelabuhan Biru Sejahtera	Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur	150.000	32.000	
6.	Sungai Citarum		Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur	50.000		
7.	Situ Wanayasa		Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa			8.200
	Total			850.000	96.500	8.200

- ❑ Pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha adalah melaksanakan temu usaha, mengenalkan program bantuan pinjaman usaha nelayan dari kementerian kelautan dan perikanan, diikuti kelompok nelayan yang ada di wilayah kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukatani, kecamatan Jatiluhur dan kecamatan tegalwaru.

### 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Sarana Pertanian

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 636.831.774,- dan terealisasi sebesar Rp. 522.663.500,- (82,07%). Terdapat 7 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Hasil kegiatan yang dicapai sebagai berikut yaitu;

- ❑ Selama tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan telah melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak yang

dilaksanakan melalui program hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat. Adapun pemberian hibah barang tersebut terdiri dari ;

- ❑ Bantuan induk sapi potong, yang terdiri dari 5 ekor sapi jantan dan 7 ekor sapi betina yang disertai bantuan pakan sebanyak 1 paket. Bantuan sapi diberikan ke Kelompok Tunas Mekar Desa Sukamulya Kecamatan Tergalwaru dan Desa Cibodas Kecamatan Bungursari. Ternak domba diberikan kepada Kelompok Peternak Domba Gembala Desa Sukadami Kecamatan Wanayasa.
- ❑ Bantuan ternak ayam buras sebanyak 1.200 ekor, yang terdiri dari 1.000 ekor ayam betina dan 200 ekor ayam jantan serta 1 paket obat-obat. Bantuan ayam buras meliputi Desa Sukajadi Kec. Pondoksalam (60 ekor), Desa Ciawi, Sumurugul Kec. Wanayasa (300 ekor), Desa Sukamanah Kec. Bojong (150 ekor), Desa Pasir angin Kec. Darangdan (180 ekor), Desa Sindang Laya Kec. Sukatani (180 ekor), Desa Cirip Kec. Kertamanah Kec. Sukasari (150 ekor).
- ❑ Pembinaan produksi ternak dilaksanakan di 30 kelompok penerima bantuan ternak, baik bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pembinaan produksi ternak lebih ditekankan pada manajemen pemeliharaan ternak, persyaratan pembibitan dan pengolahan limbah probiotik.
- ❑ Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan teknologi pakan yang dilaksanakan di kelompok Peternak Tani Makmur Jaya Desa Nagrak Kecamatan Wanayasa, Kelompok Pemuda Milenial Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes dan Kelompok Peternak Agrijayabakti Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes.

- ❑ Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dengan memberikan bantuan bibit rumput unggul sebanyak 400 stek. Pelaksanaan penanaman bibit rumput unggul dilaksanakan di kelompok TTDCM Desa Cibodas Kecamatan Bungursari.
- ❑ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pelatihan disertai praktek pengolahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) berupa silase hijauan dan dedak aromatik. Pelatihan dilaksanakan di 4 kelompok yaitu ;
  1. Kelompok TTDCM (Taruna Tani Domba Ciseureuh Mandiri, Kecamatan Bungursari,
  2. Peternak Domba Galudra, Kecamatan Pondoksalam
  3. Kelompok Peternak HITTACHI, Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa
  4. Peternak domba Sindang Panon, Desa Sindang Panon, Kecamatan Bojong
- ❑ Pengambilan dan pengujian sampel pakan dan bahan pakan, pengujian pakan mengenai analisis uji proksimat, mineral dan Gross Energi dengan spesifikasi, pengujian kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, serat kasar, mineral dan calsium. Bahan. Pengujian di laksanakan di Balai Pengujian Cikole Lembang dengan 10 kelompok dan 19 uji samel pakan. Pakan dan bahan pakan diambil baik yang berasal dari perusahaan maupun peternak atau kelompok peternak.
- ❑ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB) di 4 ULIB di 17 kecamatan, adapun hasil inseminasi buatan sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Inseminasi Buatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

No.	Capaian Kinerja	Tahun		R (%)
		2020	2021	
1.	Jumlah Akseptor (ekor)	3.677	4.092	10,14
2.	Inseminasi (ekor)	2.224	2.328	4,47
3.	Kebuntingan (ekor)	1.454	1.627	10,63
4.	Kelahiran (ekor)	1.207	1.566	22,92
5.	S/C	1,8	1,58	-
6.	CR	60,2	64	-

- ❑ Pelaksanaan Penjaringan Hasil IB pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
- ❑ Pelaksanaan pengawasan mutu benih dan bibit ternak pada tahun 2021 dilaksanakan di beberapa hatchery perusahaan pembibitan ayam ras di kabupaten Purwakarta. Pengawasan DOC tidak hanya dilakukan pada breeder tetapi juga di tingkat Poultry Shop dan peternakan komersil. Pengawas bibit ternak melaksanakan pembinaan terutama kepada peternak komersil sebagai konsumen agar lebih memperhatikan kualitas DOC yang diterima dengan memperhatikan kemasan.
- ❑ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), melalui tahapan sosialisasi ke peternak. Penerbitan SKLB dilakukan di wilayah pembibitan yaitu Kecamatan Campaka, Bungusari, Tegalwaru dan Cibatu. Jumlah ternak yang memenuhi syarat untuk mendapat SKLB sebanyak 24 ekor.
- ❑ Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan pengawasan obat hewan terhadap 69 pelaku obat hewan, yang terdiri dari 53 toko obat hewan, 9 Petshop, 2 poultryshop, 4 Perusahaan pengguna obat hewan dan 1 distributor obat hewan. Hasil pengawasan cukup baik, dimana para pelaku obat hewan telah melaksanakan prosedur penyimpanan obat



hewan sesuai dengan ketentuan, serta telah memiliki sarana penyimpanan yang memadai. Adapun hasil pengawasan peredaran obat hewan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Lokasi dan Toko pengawasan peredaran obat hewan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha					Hasil Pengawasan
		Toko	Petshop	Poultry Shop	Perusahaan Pengguna Obat Hewan	Distributor Obat Hewan	
1	Purwakarta	9	6	1	-	-	Baik
2	Babakan Cikao	3	-	-	-	-	Baik
3	Campaka	1	-	-	-	-	Baik
4	Cibatu	4	1	-	-	-	Baik
5	Bungursari	3	1	-	-	-	Baik
6	Pasawahan	1	-	-	-	-	Baik
7	Pondoksalam	1	-	-	-	-	Baik
8	Wanayasa	5	-	-	-	-	Baik
9	Kiarapedes	2	-	-	-	-	Baik
10	Bojong	3	-	-	3	-	Baik
11	Jatiluhur	3	1	-	-	1	Baik
12	Sukasari	-	-	-	-	-	
13	Sukatani	5	-	-	-	-	Baik
14	Darangdan	2	-	1	1	-	Baik
15	Plered	7	-	-	-	-	Baik
16	Tegalwaru	3	-	-	-	-	Baik
17	Maniis	2	-	-	-	-	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

#### 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran sebesar Rp. 94.999.901,- terealisasi Rp. 1.750.000,- (1,84%) terdapat 1 kegiatan untuk mendukung program tersebut.

#### 5. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mendukung sasaran ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.924.565,- terealisasi Rp. 37.024.680,- (72,70%). Terdapat 1 program dan 1 kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut. Hasil kegiatan yang menunjang sasaran ini adalah sebagai berikut ;

- ❑ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Asuransi Untuk Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) bekerjasama dengan PT. Jasindo. Pada Tahun 2021 telah terasuransikan ternak Sapi/Kerbau total yang didanai APBD berjumlah 470 ekor. Selain itu juga melakukan pendampingan kepada Kelompok UPPO yang menerima bantuan Sapi dan telah di asuransikan dengan swadaya sejumlah 160 ekor Sapi dan ada 6 ekor sapi yang asuransi secara mandiri Jadi total sapi dan Kerbau yang diasuransikan Tahun 2021 sejumlah 636 ekor.
- ❑ Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perusahaan Peternakan terutama proses Cutting HE (Hatcery Egg). Pengawasan juga dilakukan karena Perusahaan pembibit ayam ras dilarang keras memperjualbelikan telur tetas (Hatching Egg) untuk tujuan konsumsi berdasarkan Permentan 32 Tahun 2017.
- ❑ Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan kepada Perusahaan Peternakan, telah dilaksanakan pendataan Populasi dan Produksi Perusahaan Peternakan di Kabupaten Purwakarta.
- ❑ Pemberian rekomendasi lalulintas ternak/pengurusan izin usaha peternakan, Rekomendasi Lalulintas ternak dan hasil ternak baik Nasional maupun Expor/Impor. Pada tahun 2021 masih terjadi penurunan jumlah rekomendasi dibanding tahun 2020, hal ini bisa jadi masih dampak dari pandemic Covid-19, Tahun 2020 jumlah rekomendasi sebanyak 405 dan pada tahun 2021 sebanyak 398.

## 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 236.718.238,- terealisasi Rp. 235.373.750,- (99,43%) terdapat 2 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Hasil kegiatan yang dicapai sebagai berikut :

- ❑ bantuan berupa olahan ikan berupa fillet ikan kepada masyarakat desa yang memiliki balita stunting/gizi buruk di Kabupaten Purwakarta.

Adapun bantuan untuk pencegahan stunting sebagai berikut ;

Tabel 9. Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Fillet Ikan Patin (Paket)	Jumlah Penderita Stunting
1	Darangdan	1.350	228
2	Sukatani	850	144
3	Pondoksalam	160	27
4	Bojong	935	158
5	Sukasari	935	158
6	Wanayasa	635	117
7	Kiarapedes	1.070	180
8	Sukasari	270	46

- ❑ Tersedianya dokumen statistik penolahan hasil perikanan Tahun 2021.

## 7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.720.000,- dan terealisasi Rp. 19.560.000,- (94,40%), dipergunakan untuk pelaksanaan 1 program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini. Adapun hasil kegiatan yang di capai sebagai berikut;

- ❑ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan budidaya kepada petani KJA di 4 Wilayah yaitu perairan Sukatani, Sukasari, Maniis dan Tegalwaru. Pengawasn ini dilakukansalah satunya adalah pengawasan terhadap penggunaan pakan ikan, karena penggunaan

pakan ikan di perairan umum yang sistem Keramba Jaring Apung apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran.

- ❑ Kegiatan Pengawasan di perairan umum dilaksanakan dari Januari sd Oktober Tahun 2021 di wilayah meliputi wilayah Kecamatan Jatiluhur, Sukatani, Sukasari, Tegalwaru dan Maniis. Adapaun pengawasan dilakukan terhadap sarana sarana prasarana alat tangkap yang digunakan dan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dan masyarakat. Hal ini dilakukan karena masih ada beberapa pelanggaran dalam menggunakan bahan atau alat tangkap seperti penggunaan racun, penyetruman dan penggunaan jala tebar mesh size d bawah 3 inch.

#### **8. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 471.724.300,- (94,34%). Terdapat 1 program dan 5 kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut. Hasil kegiatan yang dicapai sebagai berikut;

- ❑ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengadaan suku cadang-suku cadang alat kedokteran dan Belanja Obat-obatan Lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan oleh seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, termasuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas Ciwangi dan UPTD Pasar Hewan Ciwaring.

- ❑ Pembuatan aplikasi pelayanan kesehatan hewan telemedicine berbentuk aplikasi yang diberi nama Aplikasi ini diberi nama "Cekatan" yang artinya "Cek Kesehatan Ternak/Hewan", yang diharapkan dapat membantu masyarakat Purwakarta untuk melakukan konsultasi mengenai manajemen kesehatan hewan secara online. Aplikasi ini dapat diakses melalui website : <https://cekatan.purwakartakab.go.id>.
- ❑ Pelaksanaan vaksinasi Avian Influenza (AI)/Flu burung dan desinfeksi pada unggas sehat dilaksanakan untuk mempertahankan zona kompartemen bebas AI. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia (zoonosis). Pelaksanaan vaksinasi AI di kecamatan Darangdan, Bojong, Wanayasa dan Kiarapedes dengan total unggas yang divaksin sebanyak 35.670 ekor.
- ❑ Pelaksanaan vaksinasi terhadap Anthrax bertujuan untuk mengendalikan penyakit Anthrax melalui kegiatan vaksinasi/pengebalan pada ternak rentan Anthrax antara lain sapi, kerbau, kambing dan domba yang telah dilaksanakan di Kecamatan Babakancikao, Cibatu, Camapaka dan Bungursari. Vaksinasi penyakit anthrax di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dua kali dalam setahun, terutama di daerah-daerah kantung anthrax dan pada tahun 2021 ternak yang berhasil divaksin sebanyak 665.841 ekor.
- ❑ Vaksinasi rabies dilaksanakan pada Hewan Penular Rabies (HPR) anjing, kucing, kera/monyet peliharaan, musang dan hewan penular rabies lainnya.

- ❑ Pelaksanaan pelayanan kesehatan lainnya yaitu pengobatan penyakit hewan, pemberian vitamin dan pemberian obat cacing serta penanganan gangguan reproduksi (gangrep) sebagai dukungan program swasembada daging. Pelayanan kesehatan hewan ditujukan pada ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba), unggas dan hewan lainnya.
- ❑ Pelaksanaan monitoring tempat penyediaan ternak kurban dan Pemeriksaan ante mortem hewan kurban di lokasi penyedia atau pedagang hewan kurban. Pemeriksaan post mortem hewan kurban dilokasi atau tempat pemotongan hewan kurban, di 17 kecamatan di kabupaten Purwakarta.
- ❑ Pada tahun 2021 juga dilaksanakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari yang terdiri dari; 1) Pembinaan Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) baik di Pasar Tradisional maupun di Pasar Modern guna meningkatkan pengetahuan Hygiene dan Sanitasi Produk Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH), dan menerapkan pada tempat usahanya, 2) Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) guna menjamin produk hewan yang diproduksi/diedarkan memenuhi persyaratan keamanan/mutunya, melindungi konsumen, mampu telusur (traceability); meningkatkan daya saing produk, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, 3) Pemeriksaan Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) guna

menjamin ketersediaan Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

- ❑ Pelaksanaan monitoring dan pengawasan tempat unit usaha hewan dan produk hewan, sosialisasi pada Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan serta pemeriksaan produk hewan, baik di Pasar Tradisional maupun di Pasar Modern.
- ❑ Pengamatan terhadap penyakit Menular Strategis telah dilaksanakan pada tahun 2021 dilaksanakan terhadap penyakit Avian Influenza (AI), Anthrax, Rabies, Parasit Daearah dan Rucellosis. Adapun hasil pengamatan dan uji laoboratorium terhadap Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) diantaranya untuk untuk penyakit Avian Influenza (AI) tidak terdapat kejadian kasus AI. Pengamatan terhadap penyakit Anthraks melalui pengambilan sampel sebanyak 120 sampel dan hasil dari Balai Veteriner Subang, hasil pengujian menunjukkan negatif Athrax. Hasil pengamatan pada tahun 2021 tidak terdapat kasus penyakit Rabies di Kabupaten Purwakarta. Adapun laporan penggigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) sebanyak 3 kasus gigitan, adapun jenis hewan yang menggigit, anjing 1 ekor, kucing 2 ekor (lampiran 3). Dari hasil observasi selama 14 hari dapat dinyatakan bahwa HPR yang menggigit tersebut tidak menunjukkan gejala ke arah penyakit rabies. Kasus penyakit Parasit Darah sebanyak 33 ekor sapi di Kabupaten Purwakarta. Pengambilan sampel dilakukan pada peternakan rakyat dan pengujian sampel oleh Balai Veteriner Subang sebanyak 42 sampel ulas darah menunjukkan hasil positif parasit darah *Theileria* sp. sebanyak 33 sampel dan 9 negatif parasit darah. Adapun pengamatan

penyakit Brucellosis telah dilaksanakan dengan mengambil 8 sampel serum darah di Kecamatan Bungursari dan 3.626 sampel serum darah di Kecamatan Babakancikao dikirim ke Balai Veteriner Subang dan hasil menunjukkan negatif.



Tabel 10. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (n-1) Kabupaten Purwakarta (Tabel TC. 29)

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2022) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 01 3 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3 01 3 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item jasa surat menyurat yang dibutuhkan	-	3 item	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor Dinas dan UPTD Dinas	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	42 Jenis	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan disediakan	-	19 Jenis	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	17 Jenis	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	41 jenis	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	-	12Bulan	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Jasa PTT	-	12Bulan	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 24	Penyediaan Jasa Piket Malam	Jumlah jasa piket malam	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
3 01 3 01 01 01 25	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	asa tenaga kesehatan (12 bulan), - Jasa tenaga kerja Adm. (11 Bulan)	-	23 Bulan	-	-	-	-	-	-

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	01	3	01	01	07	32	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	-	3 Jenis, 6 Unit	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	34	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yg disediakan	-	3 Jenis, 6 Unit	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	39	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yg disediakan	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	41	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas	-	69 Unit	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	43	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor	-	23 Unit	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan peralatan gedung kantor	-	60 Unit	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	60	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	20 Dokumen	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	67	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun	-	10 Buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	71	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Renja SKPD	-	30 Buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	72	Penyusunan Laporan Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD	-	8 Buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	77	Peningkatan sinergitas pembangunan	Jumlah rapat koordinasi	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	79	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang diasuranskan	-	473 org	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	07	80	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perubahan	-	25 buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	06	04	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersedianya laporan akhir tahun	-	8 Buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	06	06	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya laporan inventarisasi barang milik daerah	-	8 Buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Renja SKPD	-	30 Buku	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	06	07	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Dokumen Renstra 2018-2023	-	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	25	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
3	25	01	01	2	01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proram dan kegiatan yang disusun, Jumlah dokumen RENJA yang disusun, Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi	-	-	1 Dokumen, 2 Dokumen, 12 Bulan	1 Dokumen, 2 Dokumen, 12 Bulan	100	1 Dokumen, 2 Dokumen, 12 Bulan		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
3	25	01	01	2	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tersedia , Jumlah Tambah Penghasilan PNS yang tersedia	-	-	854 OB, 854 OB	854 OB, 854 OB	100	854 OB, 854 OB		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan kegiata yang tepat waktu dan sesuai dengan peratura perundang undangan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
3	25	01	01	2	03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan rekon inventaris BMD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
3	25	01	01	2	04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>									
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase tersampainya informasi kebijakan retribusi daerah	-	-	100%	100%	100	100%		
3	25	01	01	2	05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	100%	100%	100	100%		
3	25	01	01	2	06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
						Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jmlh komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	30 Jenis	30 Jenis	-	30 Jenis		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan, Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	10 Jenis, 5 jenis	10 Jenis, 5 jenis	-	10 Jenis, 5 jenis		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	30 Jenis	30 Jenis	-	30 Jenis		
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik yang disediakan	-	-	10 Jenis	10 Jenis	-	10 Jenis		

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	13 Jenis	13 Jenis	100	13 Jenis		
							Penyediaan Bahan Material	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	-	65 Jenis	65 Jenis	100	65 Jenis		
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah isi ulang galon, jumlah makanan dan minuman rapat tamu kantor yang disediakan	-	-	200 Galon, 1000 Dus	200 Galon, 1000 Dus	100	200 Galon, 1000 Dus		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	-	-	50 HOK	50 HOK	100	50 HOK		
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tertatanya arsip pada SKPD	-	-	100%	100%	100	100%		
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pemerintahan berbasis elektronik yg disediakan'						-		
3	25	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
							Pengadaan Mebel	Jumlah melair yang disediakan	-	-	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis		
							Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis		
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung kantor yang disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket		
3	25	01	01	2	08		<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah berkas surat yang disediakan, jumlah materai 3000, jumlah pengiriman surat	-	-	150 berkas, 300 buah, 100 buah	150 berkas, 300 buah, 100 buah	100	150 berkas, 300 buah, 100 buah		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yag disediakan	-	-	4 Jenis, 1 kegiatan	4 Jenis, 1 kegiatan	100	4 Jenis, 1 kegiatan		

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmlh jasa kebersihan kantor yang disediakan, jmlh jasa THL yang disediakan, Jmlh jasa piket malam yang disediakan, jumlah jasa PTT yang disediakan, jumlah premi asuransi pegawai Non ASN yg disediakan	-	-	195 OB, 286 OB, 182 OB, 26 OB, 504 OB	195 OB, 286 OB, 182 OB, 26 OB, 504 OB	100	195 OB, 286 OB, 182 OB, 26 OB, 504 OB			
3	25	01	01	2	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 yang disediakan'	-	-	-	-	-	50 Unit			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaann roda 2 yang disediakan, jumlah pemeliharaan roda 4 yang disediakan	-	-	-	-	-	50 Unit, 19 Unit			
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	-	-	-	-	-	10 Jenis			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	-	-	-	-	-	10 Jenis			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan, jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD PPU jumlah sarana dan prasaran Pasar Hewan yang disediakan jumlah sarana dan prasaran UPTD RPH yang disediakan	-	-	1 paket  1 paket	1 paket  1 paket	75,5	1 paket, 1 paket, 10 jenis, 10 jenis, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket			

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
								jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana BBI, jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pasar Hewan, Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana pamidangan domba, Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD PPHP, perbaikan aula Diskanak									
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	-	-	1 paket	0	-	1 paket			
3	01	3	01	01	20		<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>										
3	01	3	01	01	20	02	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah peserta pelatihan yg dilatih	-	0 Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)	Sarana Prasarana UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Cibogogirang	-	8 unit							
3	01	3	01	01	20	08	Pengembangan Budidaya Ikan Hias	Jumlah induk dan pakan ikan hias yang disediakan	-	10 ekor 90 kg	-	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	10	Pengembangan komoditas ikan unggulan Peningkatan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah induk ikan nila Jumlah induk ikan Jumlah induk ikan gurame Jumlah pakan ikan	-	35 paket, 35 Paket 8 Paket 2.750 kg	-	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	12	Peningkatan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana pembenihan ikan sistem inkubator	-	12 tabung	-	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	13	Intensifikasi Budidaya Ikan Kolam Terpal	Jumlah kolam terpal Jumlah benih ikan Jumlah pakan ikan Jumlah blower aerasi Jumlah paranet	-	15 Unit, 30.000 Ekor, 1.470 kg, 3 Unit 3 Paket	-	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	17	Pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah uji laboratorium Jumlah alat test kit kualitas air	-	4 paket 1 paket	-	-	-	-	-	-	-

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	01	3	01	01	20	19	Peningkatan sarana budidaya ikan (pakan mandiri)	Jumah mesin pakan pelet Jumlah uji proksimat pakan	-	10 Unit, 10 sampel	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	20	Pembinaan dan pendampingkan sertifikasi lahan budidaya perikanan	Jumlah sertifikasi lahan budidaya	-	200 sertifikasi	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	20	Pembinaan dan pendampingkan sertifikasi lahan budidaya perikanan	Jumlah induk ikan nila jumlah induk ikan patin	-	6 Paket 50 Ekor	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	24	Penyediaan pakan dan induk ikan unggul	Jumlah induk ikan nila 6 Paket, jumlah induk ikan patin 50 Ekor	-		-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	32	DAK Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2020		-		-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	35	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan (DID-III)	Tersedianya Benih ikan lele Tersedianya benih ikan nila, Tersedianya pakan ikan Tersedianya pakan lele dan pakan ikan nila	-	50.000 ekor 50.000 ekor 3.000 kg 6.000 kg	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	20	36	Fasilitasi Prasarana Pembudidaya Ikan (DID-III)	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang di sediakan	-	10 unit mesin pelet, 2000kg Tepung ikan, 2000kg Dedak	-	-	-	-	-
3	25	04					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>								
3	25	04	2	02			<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>								
							Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	Pelaksanaan pelatihan ikan patin, Jumlah Peserta Pelatihan Pemijahan Ikan Patin	-	-	1 kegiatan, 30 orang	1 kegiatan, 30 orang	100	1 kegiatan, 30 orang	
							Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Pembudidaya Yang Tersedia, Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibentuk,	-	-	6 dokumen, 3 kelompok, 3 kelompok, 20%	6 dokumen, 3 kelompok, 3 kelompok, 20%	100	6 dokumen, 3 kelompok, 3 kelompok, 20%	



1						2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas Kelompok, Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan								
						Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah Dokumen Badan Hukum Kelompok	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen		
						Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina	-	-	5 Kelompok	5 Kelompok	100	25 Kelompok		
3	25	04	2	04		<b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>									
						Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data pembudidaya ikan terbaru	-	-	100%	100%	100	100%		
						Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket bantuan, Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	-	-	18 Paket, 18 Kelompok	18 Paket, 18 Kelompok	100	18 Paket, 18 Kelompok		
						Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan lele yang disediakan, Jumlah pakan ikan yang disediakan, Jumlah paket budidamper yang disediakan	-	-	40.000 paket, 2.000 kg, 700 paket	40.000 paket, 2.000 kg, 700 paket	100	40.000 paket, 2.000 kg, 700 paket		
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah	Jumlah sampel ikan, pakan dan air yang diuji	-	-	33 sample	33 sample	100	5 sample		
						Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat	Jumlah aktifitas budidaya yang dibina dan dipantau	-	-	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100	17 Kecamatan		
						Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Jumlah lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya	-	-	174 sertifikat	200 sertifikat	62,99	200 sertifikat		

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	01	3	01	01	21		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>									
3	01	3	01	01	21	08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan Kecil	Jumlah perahu nelayan Jumlah jaring insang	-	2 Unit 105 Pcs	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	09	Pendataan dan Pemetaan potensi Perikanan Tangkap	Pendataan dan Pemetaan potensi Perikanan Tangkap	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	13	Kegiatan pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap	Jumlah poetsni perikanan tankap	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	14	Kegiatan pembinaan kemitraan usaha nelayan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan	Jumlah kelompok nelayan yg dibina	-	6 Kelompok	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	15	Kegiatan peningkatan SDM nelayan	Jumlah peserta pelatihan	-	120 Orang	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	16	Kegiatan pembuatan kartu anggota (KTA) nelayan	Jumlah kartu nelayan dan Pokmaswas	-	300 Kartu	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	17	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	18	DAK Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2020	Jumlah jaring insang	-	775 Pcs	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	21	19	Kegiatan penebaran ikan di perairan umum (Restocking)	Jumlah jikan yang diteba Jumlah kelompok penerima sosialisasi	-	302.000 Ekor 4 kelompok	-	-	-	-	-	-
3	25	03					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>									
3	25	03	2	01			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota</b>									
							Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah dokumen potensi dan produksi perikanan tangkap	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
							Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah coolbox yang disediakan, Jumlah freezer yang disediakan, Jumlah jaring insang yang disediakan,	-	-	12 buah, 3 unit 600 pcs 3 unit	12 buah, 3 unit 600 pcs 3 unit	100	12 buah, 3 unit 600 pcs 3 unit		

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								Jumlah perahu yang disediakan								
							Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah benih ikan yang ditebarkan	-	-	954.700 ekor	954.700 ekor	100	954.700 ekor		
3	25	03	2	02			<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
							Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih	-	-	5 kelompok	-	0	5 kelompok		
							Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah KTA yg diterbitkan, Jumlah kelompok berbadan hukum	-	-	100 KTA, 8 kelompok	100 KTA, 8 kelompok	100	100 KTA, 8 kelompok		
							Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pdanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah temu usaha yang dilaksanakan	-	-	4 Kelompok	-	0	4 Kelompok		
2	03	3	01	01	22		<b>Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani</b>									
2	03	3	01	01	22	01	Penebaran benih ikan di kolam pekarangan/tetenong	Jumlah benih ikan yang ditebar Jumlah pakan ikan Jumlah ikan stunting	-	65.000 ekor ikan nila 1.500 kg 1.000 paket untuk 200 KK	-	-	-	-	300.000 ekor	100
2	03	3	01	01	22	03	Penyediaan pangan hewani untuk perbaikan gizi masyarakat	Jumlah penyediaan telur Jumlah Penyediaan daging Jumlah penyediaan susu Jumlah penyediaan daging ayam	-	16 ton 2 ton 1.325 liter 3.480 kg	-	-	-	-	16 ton	100
2	03	3	01	01	22	05	Pengembangan statistik peternakan dan perikanan	Jumlah dokumen statistik perikanan dan peternakan	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100
3	03	3	01	01	33		<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>									
3	01	3	01	01	23	15	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar hewan	Jumlah bangunan yg dipelihara	-	2 bangunan	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	23	23	Asuransi Ternak Sapi dan Kerbau	Jumlah ternak yang diasuransikan	-	280 Ekor	-	-	-	-	-	-
3	01	3	01	01	23	24	Pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pamiangan	Jumlah bangunan yg dipelihara	-	2 bangunan	-	-	-	-	-	-

							domba															
1							2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	01	3	01	01	23	25	Kontes ternak dan panet pedet tingkat Kabupaten / Provinsi	Jumlah kegiatan kontes ternak dan pesta patok Tk. Provinsi Jumlah Keg. Panen pedet		1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	01	3	01	01	23	27	Peningkatan sarana dan prasarana pasar hewan	Jumlah bangunan yg dipelihara		1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	01	3	00	01	24		<b>Program peningkatan produksi peternakan</b>															
3	01	3	00	01	24	07	Pengembangan Budidaya ternak domba	Jumlah pengadaan ternak domba Jumlah dedak/stumulan pakan		12 Ekor 800 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	01	3	00	01	24	13	Pengembangan hijauan makanan ternak (HMT)	Jumlah bibit unggul yang ditanam		1.700 stek												
3	01	3	00	01	24	20	Pengembangan budidaya ayam lokal	Jumlah pengadaan ternak ayam lokal		1.200 ekor												
3	01	3	00	01	24	21	Pengembangan Teknologi Pakan	Jumlah peserta Bintek Teknolgi pakan		20 orang						-	-	-	-			
3	01	3	00	01	24	23	Pengawasan mutu benih dan bibit ternak	Jumlah peserta pelatihan peternak pembibit		15 orang												
3	01	3	00	01	24	25	Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada Ruminansia	Jumlah pengadaan straw ruminansia		1.700 dosis						-	-	-	-			
3	01	3	00	01	24	26	Penjaringan Hasil IB	Jumlah penjaringan anak hasil IB		6 Ekor dan 1 ekor hasil TE						-	-	-	-			
3	01	3	00	01	24	30	Peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak sapi (DID-III)	Jumlah pengadaan ternak sapi jumlah pakan ternak		10 Ekor 1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	01	3	00	01	24	31	Peningkatan kesejahteraan Masyarakat peternak domba (DID-III)	Jumlah pengadaan ternak Domba		80 ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	01	3	01	01	26		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>			-												
3	01	3	01	01	26	01	Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada Ruminansia	Terlaksannaya kegiatan kontes ternak dan pesta patok Tk. Prov Jabar		1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
							Terlaksananya Pelayanan IB Terlaksananya PKB Terlaksananya penunjang keg IB Terlaksananya pengadaan obat-obatan penunjang keg IB Terlaksananya pengadaan cetak informasi kegiatan IB Terlaksananya Kegiatan panen Pedet Tk Kab. Purwakarta	- - - - - -	2.000 dosis 1.200 ekor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
3	01	3	01	01	26	02	Penyelamatan/Penjaringan Anak Hasil IB	Terlaksananya kegiatan Penjaringan Anak Hasil IB	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	
3	01	3	01	01	26	03	Pengadaan Alat dan mesin peternakan	Tersedianya alat dan mesin pengolah pakan ternak Tersedianya mesin tetas telur	- -	3 Unit 1 unit	- -	- -	- -	- -	- -	
3	27	02					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA SARANA PERTANIAN</b>								-	
3	27	02	2	01			<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>								-	-
							Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Peternak Sapi/Kerbau Yang Ikut Sosialisasi Asuransi Ternak Jumlah Ternak Yang Diasuransikan			15 Kelompok 470 Ekor	15 Kelompok 470 Ekor	100	15 Kelompok 470 Ekor		-
3	27	02	2	02			<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Kewenangan Kabupaten / Kota</b>									
							Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah IB, Kebuntingan, Kelahiran kontes Ternak			17 kecamatan	17 kecamatan	100	17 kecamatan		
3	27	02	2	03			<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah</b>									

Kabupaten/Kota															
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pengawasan Mutu DOC				10 lokasi	10 lokasi	100	10 lokasi	
3	27	02	2	04		<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>									
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pelaku usaha penjual obat hewan Pelaku usaha pengguna obat hewan				30 orang 5 perusahaan	30 orang 5 perusahaan	100	30 orang 5 perusahaan	
3	27	02	2	05		<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
						Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Pengawasan mutu Benih dan Bibit Ternak Pembinaan kelompok pembibit				20 ekor calon bibit 2 kegiatan	20 ekor calon bibit 2 kegiatan	100	20 ekor calon bibit 2 kegiatan	
						Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah sampel bibit tanaman yang diuji								
						Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengawasan mutu DOC								
3	27	02	2	06		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>									
						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak ruminansia besar yang dibudidayakan (sapi) Jumlah ternak ruminansia kecil yang dibudidayakan (domba) Jumlah ternak unggas yang dibudidayakan (ayam lokal) (stunting)				5 ekor 7 ekor 1.200 ekor	5 ekor 7 ekor 1.200 ekor	100	5 ekor 7 ekor 1.200 ekor	
						Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Hijauan Pakan Ternak				440 Batang	440 Batang	100	440 Batang	

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	03					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>									
3	27	03	2	02			<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>									
3	27	03	2	02	07		Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah bangunan RPH yang direhabilitasi			1 Bangunan	-	-	1 Bangunan		
3	01	3	00	01	34		<b>Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>									
3	01	3	00	01	34	01	Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu	Jumlah pelayanan keswan terpadu		44 kali	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan hewan		14 jenis	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	03	Pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan	Jumlah kasus PHMS		0 kasus	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan	Jumlah jenis peralatan Rumah Potong Hewan		6 item	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	10	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah ternak dan hewan yang ditangani		408 Ekor	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	11	Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah lokasi pemeriksaan peredaran Pangan Asal Hewan/Bahan Pangan Asal Hewan Jumlah unit usaha yang dilakukan peminaan NKV		12 Lokasi 6 lokasi	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	12	Pemeriksaan Hewan Qurban	Jumlah Sosialisasi Hewan Kurban Jumlah lokasi pemeriksaan hewan kurban		1 kegiatan 17 Kecamatan	-	-	-			
3	01	3	00	01	34	13	Pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah peralatan uji cepat pemeriksaan Produk Asal Hewan Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang disediakan		3 Jenis 4 Jenis	-	-	-			

1				2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	04				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>								
3	27	04	2	01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis	Aplikasi pelayanan kesehatan hewan jumlah lokasi yang divaksin Ai/desinfektan Jumlah lokasi yang divaksin anthrax Jumlah lokasi yang divaksin rabies Jumlah pengawasan pada perusahaan yang menerapkan biosecurity Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan yang disediakan Peningkatan status kesehatan hewan		1 paket 4 kecamatan 4 kecamatan 5 kecamatan 5 Unit 16 Jenis 17 Kecamatan	1 paket 4 kecamatan 4 kecamatan 5 kecamatan 5 Unit 16 Jenis 17 Kecamatan	100	1 paket 4 kecamatan 4 kecamatan 5 kecamatan 5 Unit 16 Jenis 17 Kecamatan		
						Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	Monitoring dan sosialisasi kompartemen dan zonasi AI Surveillance penyakit		5 Lokasi 17 Kecamatan	5 Lokasi 17 Kecamatan	100	5 Lokasi 17 Kecamatan		
3	27	04	2	02		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
						Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Penilaian keamanan produk hewan		3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis		
						Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan		17 Kecamatan	17 Kecamatan	100	17 Kecamatan		



1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	04	2	03		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jenis sample Pemeriksaan spesimen			2 Jenis 240 sample	2 Jenis 240 sample	100	2 Jenis 240 sample		
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak hewan yang ditangani			450 ekor	450 ekor	100	450 ekor		
3	27	04	2	04		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>									
						Pendampingan Penerapan Unit Usaha Hewan dan Produk hewan	Jumlah unit lokasi pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan			10 Lokasi	10 Lokasi	100	10 Lokasi		
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah lokasi pengawasan atas peredaran hewan dan produk hewan			17 kecamatan	17 kecamatan	100	17 kecamatan		
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi pengujian produk pangan asla hewan			6 Lokasi	6 Lokasi	100	6 Lokasi		
3	27	04	2	05		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>									
						Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah lokasi penerapan unit kesejahteraan hewan			10 Lokasi	10 Lokasi	100	10 Lokasi		
						<b>PROGRAM PENYULUH PERTANIAN</b>									
						<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>									
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Populasi Kelompok Peternakan Yang Tersedia Jumlah Kelompok Peternak yang dibina Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Peternak			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen 15 Kelompok 20%		

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3	01	3	01	01	24		<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>										
3	01	3	01	01	24	03	Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perikanan perairan umum	Jumlah gedung yang dipelihara		1 Gedung	-	-		-	-	-	-
3	01	3	01	01	24	04	Pengembangan potensi perikanan perairan umum	-		-				-	-	-	-
3	01	3	01	01	24	05	Pembinaan masyarakat nelayan Jatiluhur	-		-	-	-		-	-	-	-
3	25	05					<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
3	25	05	2	01			<b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>										
							Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap Jumlah wilayah kawasan perikanan Tangkap	17 kecamatan 4 kawasan	17 kecamatan 4 kawasan	100 100			4 POKMASWAS 4data dari 4 wilayah			
							Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap Jumlah wilayah kawasan perikanan Tangkap	17 kecamatan 4 kawasan	17 kecamatan 4 kawasan	100 100			4 Wilayah 4 Data sapras budiday dari 4 wilayah			
3	01	3	01	01	50		<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>				-	-		-	-	-	-
3	01	3	01	01	50	30	Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelatihan hasil perikanan non konsumsi dan lomba pengolahan ikan	-	2 Kegiatan	-	-		-	-	-	-

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	01	3	01	01	50	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan	Jumlah Gedung yg dipelihara		1 paket	-	-	-			
3	01	3	01	01	50	05	Pengembangan produk hasil perikanan	Jumlah Desa Program Stunting, Jumlah KK Penerima Paket Bahan Olahan Ikan		27 desa 3000 KK	-	-	-	-	-	-
3	25	06					<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>									
3	25	06	2	01			<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>									
							Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Presentase Data Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan			100%	100%	100	100%		
3	25	06	2	02			<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>									
							Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)/UKM yang dibina			'100 unit 20 Kelompok/ UKM	'100 unit 20 Kelompok/ UKM	100	'100 unit 20 Kelompok/ UKM		
3	25	06	2	03			<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									
							Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Angka Konsumsi Ikan Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan			35,81 kg/kapita/th 95 ton	35,81 kg/kapita/th 95 ton	100	35,81kg/kapita/th 95 ton		
3	03	3	01	01	23		<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>									
3	03	3	01	01	23	15	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar hewan	Jumlah bangunan yg dipelihara		2 Bangunan	-	-	-	-		

1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	03	3	01	01	23	23	Asuransi Ternak Sapi dan Kerbau	Jumlah ternak yang diasuransikan		280 Ekor	-	-	-	-		
3	03	3	01	01	23	24	Pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pamiangan domba	Jumlah bangunan yg dipelihara		1 Bangunan	-	-	-	-		
3	27	04					<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>									
3	27	04	2	02			<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah Kabupaten/Kota</b>									
							Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeuaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Tercapainya pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan Tercapainya pencegahan penyebaran penyakit hewan Terlaksananya pengawasan penerapan persyaratan teknis pengeluaran hewan dan produk hewan			8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan	Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan	100	8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan		

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan**

### **2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya yang berkenaan dengan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 245 Tahun 2021, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- 1) Perumusan Kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusa pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
- 4) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang peternakan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

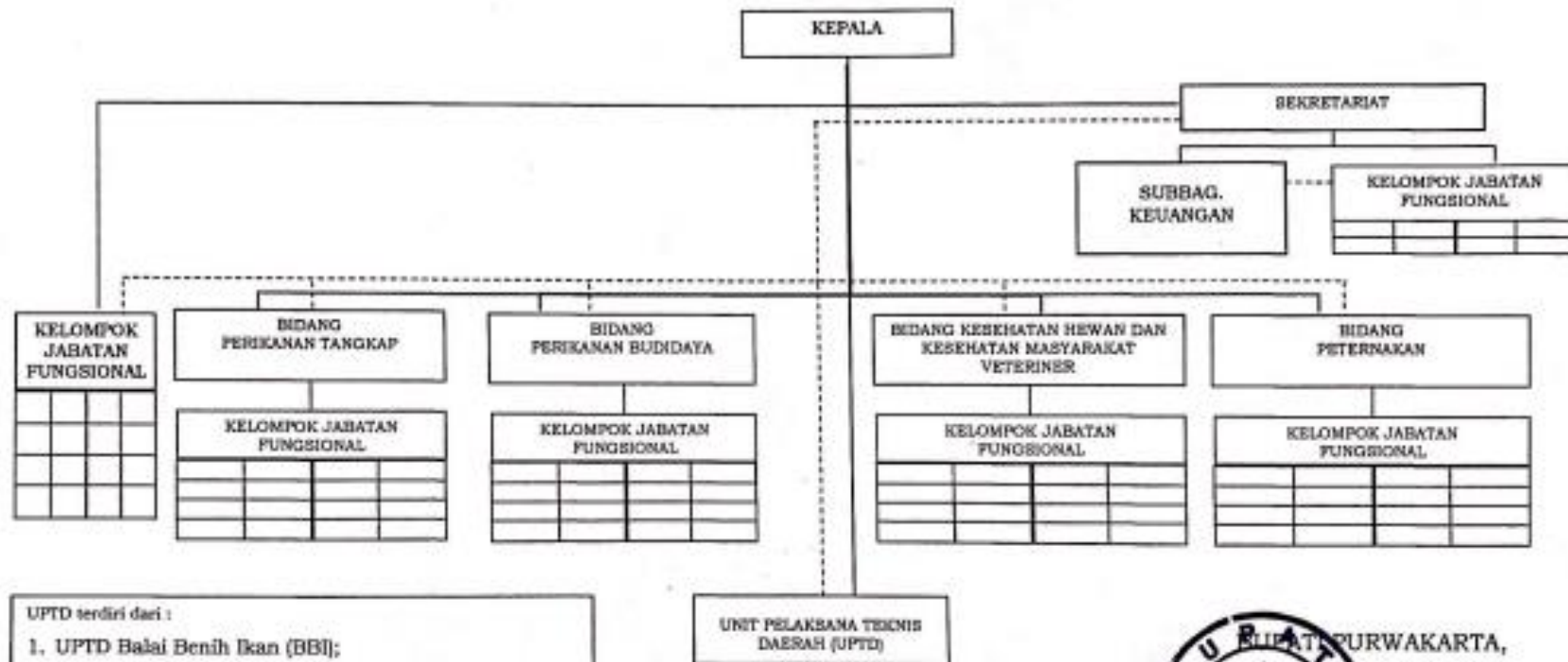
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum;
  - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil;;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil; dan
  - 3. Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Nelayan Kecil.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Sub-Substansi Produksi;;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Usaha; dan
  - 3. Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana..
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Sub-Substansi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
  - 3. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Peternakan, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Sub-Substansi Pembibitan;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Pakan Ternak; dan
  - 3. Kelompok Sub-Substansi Bina Usaha Peternakan.
- g. UPTD terdiri dari :
  - 1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
  - 2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
  - 3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
  - 4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
  - 5. UPTD Pasar Hewan;
  - 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- h. Jabatan Fungsional.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 149 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 Desember 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA

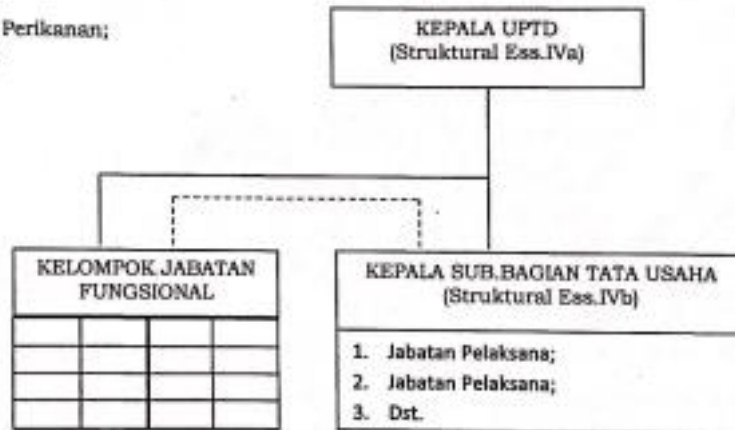


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 249 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 Desember 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

UPTD Kelas A Terdiri dari:

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
5. UPTD Pasar Hewan; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.





## 2.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Kajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut ;

### 1. Penyediaan Pangan Hewani

Berdasarkan hasil perhitungan NBM (Neraca Bahan Makanan) tahun 2021, penyediaan produksi pangan hewani untuk di konsumsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Penyediaan Produksi Pangan Hewani Tahun 2021

No	Jenis Bahan Pangan Hewani	Jumlah Penyediaan (kg)	Konsumsi Perkapita (kg/kap/tahun)
1.	Daging (kg)	47.271.226	35,56
2.	Telur (kg)	25.957.164	23,82
3.	Susu (kg)	36.473	0,14
4.	Ikan (ton)	47.894.001	39,58

Dari data diatas menunjukkan bahwa penyediaan produksi daging untuk konsumsi pada tahun 2021 sebesar 47.271.226 kg (35,56kg/kapita), capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,61 kg/kapita/tahun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,33 persen dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 44.456.738 kg, secara umum bahwa penyediaan produksi daging tahun 2021 masih mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Purwakarta.

Penyediaan produksi telur untuk konsumsi tahun 2021 sebesar 25.957.164 kg (23,82kg/kapita) mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen dari tahun 2020 yaitu 25.461.550 kg, peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 mulai bermunculan peternakan ayam ras petelur skala rakyat.

Penyediaan produksi susu untuk konsumsi pada tahun 2021 sebesar 36.473 kg (0,14kg/kapita), belum sesuai target yang ditetapkan yaitu 0,25kg/kapita, belum ada peningkatan penyediaan sehingga angka konsumsi naik dibandingkan tahun 2020 yaitu 0,56 kg (kg/kapita).

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik peternakan, jumlah produksi hasil peternakan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Jumlah Produksi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020 (kg)

No.	Jenis Produksi Ternak	Tahun 2020	Tahun 2021	Pertumbuhan (%)
<b>A.</b>	<b>DAGING</b>	<b>59.346.129</b>	<b>61.361.484</b>	<b>3,40</b>
1.	Sapi Potong	1.526.423	1.350.366	-11,53
2.	Kerbau	9.261	10.290	11,11
3.	Domba	14.729.715	15.776.871	7,11
4.	Kambing	203.986	142.856	-29,97
5.	Ayam Buras	1.381.193	1.513.163	9,55
6.	Ayam Ras Petelur	453.526	544.380	20,03
7.	Ayam Ras Pedaging	40.264.959	41.423.902	2,88
8.	Itik	777.065	599.656	-22,83
<b>B.</b>	<b>TELUR</b>	<b>20.836.650</b>	<b>21.332.264</b>	<b>2,38</b>
9.	Ayam Buras	3.200.421	3.506.216	9,55
10.	Ayam Ras Petelur	9.836.595	11.807.124	20,03
11.	Itik	7.799.634	6.018.925	-22,83
<b>C.</b>	<b>SUSU</b>	<b>49.406</b>	<b>36.473</b>	<b>100</b>
12.	Susu sapi segar	36.473	36.473	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>80.182.778</b>	<b>82.693.748</b>	<b>3,13</b>

Produksi ternak ruminansia pada tahun 2021 banyak mengalami penurunan, terutama produksi sapi potong, kambing. Sedangkan produksi unggas yang mengalami kenaikan yang cukup tajam kecuali unggas itik. Pada tahun 2021 produksi ternak sapi mengalami penurunan disebabkan penurunan jumlah pemotongan, demikian juga halnya dengan daging kambing. Selain itu banyak konsumen yang beralih dari daging segar ke daging beku. Hal ini disebabkan harga daging beku jauh lebih murah dari harga daging segar. Beralihnya

konsumen daging segar ke daging beku dapat dilihat dari total pemotongan ternak sapi dari tahun 2020 sebanyak 6.001 ekor menjadi 5.581 ekor pada tahun 2021. Demikian juga pada daging kambing pada tahun 2020 pemotongan sebanyak 12.943 ekor dan pada tahun 2021 sebesar 9.064 ekor.

Secara keseluruhan produksi daging tahun 2020 mengalami kenaikan dari 59.346.129 kg menjadi 61.361.484 kg pada tahun 2021 atau terjadi penurunan 3,40 persen dari tahun 2020. Demikian juga terjadi kenaikan pada produksi telur, pada tahun 2021 produksi telur mengalami kenaikan sebesar 2,38 persen dari 20.836.650 kg pada tahun 2020 naik menjadi 21.332.264 kg pada tahun 2021

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator kinerja bagi Dinas perikanan dan peternakan yang mempunyai urusan dengan produksi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan. Menurut FAO, skor PPH yaitu sebesar 90 dan jumlah ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/orang/hari. Capaian skor PPH mencapai 26,26 (109,40%) dari target 2019 sebesar 24). Hasil capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 13. Ketersediaan Pangan Berdasarkan Potensi Produksi Pangan Hewani Tahun 2021

No.	Kelompok Pangan	Gram/kap/hari	Energi (kkal)	% AKE	Bobot	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pangan Hewani :							
	- Ternak	125,71	288,83	13,13	2	26,26	24	26,26
	- Ikan	89,47	59,95	95,16	2	190,32	24	190,32
	JUMLAH							<b>29,88</b>

Keterangan : AKE :2200 kkal/kap/hari, AKP : 63 gram/kap/hari ,Bobot : 2,0

## 2. Penyediaan Pangan Asal Ikan

Pada Tahun 2021 produksi ikan di Kabupaten Purwakarta sebesar 109.409,14 ton, menurun sebesar 0,48% dari tahun 2020. Produksi ikan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Produksi Ikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Ikan

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)		
		2020	2021	%
1.	Mas	44.222,11	43.101,63	-2,53
2.	Nila	36.099,47	35.312,03	-2,18
3.	Tawes	6,00	3,50	-41,64
4.	Gurame	19,40	45,24	133,20
5.	Tambakan	0,00	0,00	0,00
6.	Sepat	20,84	52,55	152,12
7.	Lele	604,29	1.219,42	101,79
8.	Patin	17.399,08	17.270,53	-0,74
9.	Bawal	11.469,10	12.257,37	6,87
10.	Bandeng	0,37	0,00	-100,00
11.	Ikan Lainnya	92,80	146,87	58,27
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.933,45</b>	<b>109.409,14</b>	<b>-0,48</b>

Produksi ikan tersebut berasal dari kolam budidaya, budidaya ikan keramba jaring apung (KJA) dan hasil tangkapan di perairan umum. Pada tahun 2021 produksi ikan di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan (0,48%). Sebagai implementasi penataan lokasi dan pengendalian keramba jaring apung serta penanggulangan pencemaran air baku guna mewujudkan keseimbangan ekosistem di Waduk Ir. H.Juanda Jatiluhur Purwakarta, maka dilakukan tindakan penataan terhadap Keramba Jaring Apung yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Operasi Danau Jatiluhur Bersih, yang berpengaruh langsung terhadap penurunan produksi ikan budidaya Keramba Jaring Apung. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kematian masal di KJA sebanyak tiga kali ditambah dengan

pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, yang pada akhirnya menghambat kegiatan usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung, terutama transportasi pakan, pemasukan benih ikan dan juga hasil panen.

Tabel 15. Produksi Ikan Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020 berdasarkan Jenis Usaha.

No.	Produksi Ikan	Tahun 2020 (ton)	Tahun 2021 (ton)	%
1.	Kolam budidaya	1.828,04	1.852,23	1,32
2.	Keramba Jaring Apung (KJA)	106.833,00	106.185,66	-0,61
3.	Hasil tangkapan	1.272,41	1.371,25	7,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.409,14</b>	<b>-0,53</b>

Produksi ikan kolam budidaya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,53% dari tahun 2020, terutama jenis ikan nila, mas, patin dan bawal. Produksi ikan kolam budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 16. Produksi Ikan Kolam Budidaya Tahun 2021

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan Kolam Budidaya (ton)		
		2020	2021	%
1.	Mas	285,11	286,50	0,49
2.	Nila	676,19	678,80	0,38
3.	Tawes	-	-	-
4.	Gurame	19,40	22,62	14,24
5.	Tambakan	-	-	-
6.	Sepat siam	17,22	22,73	14,24
7.	Lele	600,78	604,28	0,58
8.	Patin	148,38	152,37	1,54
9.	Bawal	76,97	82,54	6,75
10.	Bandeng	-	-	-
11.	Ikan Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.828,04</b>	<b>1.852,23</b>	<b>1,32</b>

Tabel 17. Produksi Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan KJA (ton)		
		2020	2021	%
1.	Mas	43.785,00	42.794,98	-2,26
2.	Nila	34.859,00	33.945,75	-2,62
3.	Tawes	-		
4.	Gurame	-	22,62	100
5.	Tambakan	-		
6.	Sepat siam	-	22,73	100
7.	Lele	-	604,28	100
8.	Patin	16.817,00	16.654,76	-0,96
9.	Bawal	11.372,00	12.140,54	6,76
10.	Bandeng			
11.	Ikan Lainnya			
	<b>JUMLAH</b>	<b>106.833,00</b>	<b>106.185,66</b>	<b>-0,61</b>

Pada tahun 2017 di Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur dilaksanakan penataan lokasi dan pengendalian keramba jaring apung serta penanggulangan pencemaran air baku guna mewujudkan keseimbangan ekosistem, sehingga dilakukan tindakan penertiban terhadap keramba jaring apung yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Operasi Danau Jatiluhur Bersih. Kegiatan ini didasari oleh kesepakatan bersama antara Perum Jasa Tirta II dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 1/Dir/11/MOU/2016, Nomor : 180/24/Huk/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penertiban Waduk Ir. H.Djuanda Jatiluhur serta Pemanfaatan dan Penataan Lahan Pengairan /Irigasi Serah Operasi Perusahaan Umum Jasa Tirta II di Wilayah Purwakarta, dan adanya Perjanjian Kerjasama Antara perum Jasa Tirta II dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 1/DIR/02/PKS/2018, Nomor 180/02/DLH/2018 tentang Penertiban Waduk Ir. H.Djuanda Jatiluhur. Adanya kegiatan penertiban KJA tersebut berpengaruh langsung pada penurunan produksi ikan budidaya Keramba Jaring Apung, yang berakibat produksi ikan KJA pada tahun 2021 turun drastis.

Tabel 18. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta (Tabel TC. 30)

No.	Indikator	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Pencapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
1.	Produksi ikan hasil tangkapan (ton)	1.183	1.272	1.367	1.470	1.183,6	1.272,41	106.185,66		
2.	Jumlah ikan yang ditebarkan (Restocking) (ekor)	410.000	450.000	500.000	550.000	350.000	870.000	954.700		
3.	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibina (kelompok)	46	48	51	53	44	48	51		
4.	Produksi Ikan Konsumsi (ton)	1.899	13.899	14.279	14.735	94.470,30	109.993,45	109.409,14		
5.	Produksi Benih Ikan UPR(ekor)	61.768.000	741.225.600	889.470.720	1.067.364.864	582.550.000	741.649.000			
6..	Produksi Benih UPTD BBI (ekor)	5.440.000	5.880.000	6.320.000	6.740.000	6.323.494	6.650.000	12.852.500		
7.	Produksi Ikan Hias (ekor)		135.360	162.432	194.918	95.880	330.000	822.170		
8.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (Kelompok)	118	121	124	127	118	121	126		
9.	Luas Lahan Budidaya Yang Disertifikasi (ha)	4	4	4	4	8,70	4	4		
10.	Wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya (kecamatan)		17	17	17		17	17		
11.	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)		28,76	28,76	28,76		35,81	39,58		
12.	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)		90	95	100		93	250		
13.	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (kelompok)		14	15	16		14	11		
14.	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (unit)		105	110	115		105	111		
	<b>PERTANIAN (PETERNAKAN)</b>									
1.	Produksi Hasil Ternak (%)	3	3	2	2	7,24	0,97	2,00		
2.	Jumlah Akseptor IB (ekor)	1.500	1.545	1.622	1.704	4.891	4.822	4.092		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
3.	Jumlah kelahiran sapi potong hasil IB dan Kawin alam (ekor)	1.200	1.224	1.248	1.273	1.363	1.707	4.424		
4.	Budidaya Ternak Ruminansia unggul (Lokasi)	2	2	2	2	10	20	15		
5.	Budidaya Ternak Unggas unggul (Lokasi)	2	2	2	2	25	9	14		
6..	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) (lokasi)	1	1	1	1	-	4	1		
7.	Jumlah pelaku usaha penyedia dan peredaran obat hewan yg dibina (orang)		30	30	30		30	30		
8.	Jumlah produsen pakan yang dibina (produsen)		2	2	2		2	2		
9.	Tersedianya RPH yang memenuhi persyaratan teknis (unit)		1	1	1		1	1		
10.	Persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik (%)		70	70	70		72,2	70,25		
11.	Persentase ternak yang diobati (Non Zoonosis) dari populasi ternak (%)		20	20	20		20	20		
12.	Status Bebas Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (kasus)		0	0	0		0	0		
13.	Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang ditangani kesehatannya (ekor)	380	408	429	450	766	2.073			
14.	Jumlah pemasukan dan Pengeluaran Ternak (lalu lintas ternak) (ekor)		36.817	38.195	39.574	67.908	60.917			
15.	peningkatan penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) (kecamatan)	17	17	17	17	17	17	17		
16.	Produk hasil ternak yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (jenis)			3	3		3	3		
17.	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan (kelompok)	96	97	98	99	104	112	103		
18.	Jumlah peternak yang terlatih (orang)	50	25	25	25	50	50	100		
19.	Jumlah pelaku peternak yang berpestasi (penghargaan)		2	2	2	-	-	-		



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan**

Berdasarkan hasil kajian pencapaian kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu antara lain ;

1. Meningkatkan penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan.
4. Mengembangkan sentra pembibitan ternak dan pembenihan ikan di pedesaan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak.
6. Meningkatkan penerapan teknologi perikanan dan tepat guna.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana agribisnis perikanan dan peternakan.
8. Mengembangkan kawasan usaha peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan peternakan dan perikanan.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pembangunan perikanan dan peternakan serta pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor internal merupakan kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal merupakan tantangan dan peluang tetapi juga dapat menjadi hambatan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pengembangan perikanan dan peternakan antara lain :

- Perikanan dan peternakan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan dan gizi, penyediaan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan keluarga.
- Produk perikanan dan peternakan merupakan komoditas strategis dan prospektif. Permintaan pasar terhadap komoditas perikanan dan peternakan seperti daging, telur, susu dan ikan cukup tinggi. Hal ini merupakan peluang untuk mengembangkan usaha perikanan dan peternakan.
- Permintaan terhadap benih ikan yang berkualitas relatif tinggi untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Waduk Jatiluhur. Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan usaha pembenihan ikan rakyat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui mekanisme *bottom up maupun top down*. Mekanisme *bottom up* dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme *top down* dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD) dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta melaksanakan 1 Program Penunjang dengan 7 kegiatan, Urusan Pertanian

(Peternakan) terdiri dari 4 Program dengan 13 Kegiatan dan urusan Kelautan dan Perikanan dengan 4 Program 8 Kegiatan, sehingga total 9 Program dan 28 Kegiatan.

**a. Program pada setiap Perangkat Daerah;**

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 1) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
  - 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan/Material
  - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

***b. Program Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan;***

**II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - 2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
  - 3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

### **III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Keci
  - 1) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keci
  - 2) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keci
  - 3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
  - 4) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan dan Peternakan)
  - 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 4) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 5) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
  - 6) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan

### **IV. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
  - 1) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  - 2) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

## **V. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
  - 1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan)
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci
  - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan)
3. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan)
  - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan)

### ***c. Program Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan);***

## **VI. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
  - 1) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

- 2) Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- 6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
  - 1) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
  - 2) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

**VII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

- 1. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

**VIII. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

- 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - 2) Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) .....
- 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
  - 2) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
  - 3) Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
  - 2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- 2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- 3) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
  - 1) Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

**IX. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
  - 1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.



Tabel 19. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta (TC-31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Proram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Produksi Ikan Hasil Tangkapan; Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking); Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	1.367 Ton; 550.000 Ekor; 53 Kelompok		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Produksi Ikan Hasil Tangkapan; Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking); Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	1.367 Ton; 550.000 Ekor; 53 Kelompok	<b>540.273.160</b>
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>295.489.350</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat d	1 dokumen	69,558,470	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pwk	Dokumen data potensi perairan darat Kabupaten Purwakarta	1 dokumen	35.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pwk	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Unit	217,081,643	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pwk	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Unit	117.081.643
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pwk	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	200 Unit	393,191,517	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pwk	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	200 Unit	293.191.517
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pwk	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	55,004,550	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pwk	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	35.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 kelompok  5 Kelompok	52.427.883	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 kelompok  5 Kelompok	30.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pwk	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	55,295,440	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah temu usaha yang dilaksanakan	3 Kali	30.000.000
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina Produksi Ikan Konsumsi Produksi Benih Ikan BBI Produksi Benih Ikan UPR Produksi Ikan Hias			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>1.041.100.000</b>
	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>					<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok	63.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok	30.000.000
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan	4 kelompok	63.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	30.000.000
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pwk	Jumlah Kelompok usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4 kelompok	55,253,441	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pwk	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	30 orang	25.000.000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pwk	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 kelompok	63.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pwk	Jumlah Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	30.000.000
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>					<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>				
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	30.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit  5 unit	1.050.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	5 Unit	557.400.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Dae	5 Unit	559.831.860	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	5 Unit	278.700.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	63.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	30.000/000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Orang	45.230.800	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 orang	20.000.000
						Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	200 sertifikat	10.000.000
III	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	17 Kecamatan		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	17 Kecamatan	50.000.000
	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	1 Dokumen	25.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	25.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	1 Dokumen	25.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	25.000.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Angka Konsumsi Ikan Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Produksi Olahan Produk Perikanan			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Angka Konsumsi Ikan; Produksi Olahan Produk Perikanan; Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan; Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	28,76 kg/kap/th; 100 Ton; 16 Kelompok; 115 Unit	<b>224.550.000</b>
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>					<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	22,050,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	22.050.000
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>					<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pwk	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai skala Usaha dan Risiko	40 unit	60,000,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah Kelompok/Unit Pengolah dan Pemasar yang dibina Jumlah Unit Pengolah Ikan yang dilatih	40 unit	60.000.000
	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/Kota	3.25 Ton	262,500,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,25 ton	162.500.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B Opini Publik		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B Opini; 100 Persen	<b>12.534.496.292</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	34,961,300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.357.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pwk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	12,147,300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pwk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	27.426.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	12,147,300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pwk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	8.643.600
	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	6,258,100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	12.147.300

			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6,258,100		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.258.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	24,631,690		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Laporan	6.258.100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	24.631.600		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	24.631.600
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pwk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	854 OB 854 OB	10,314,836,174		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pwk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	854 OB	9.708.369.537
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pwk	Laporan Keuangan	1 Dokumen	31,750,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pwk	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundangundangan	12 Laporan	28,268,750		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	28.268.750
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pwk	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8,268,750		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pwk	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.268.750

SKPD					SKPD				
------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	5,512,500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.512.500
						<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				
						Analisa dan pengembangan Retrbsi Daerah serta penyusunan kebijakan Retribusi daerah	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	200.000.000
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	pwk	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	20.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pwk	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	39,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pwk	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pwk	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pwk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.562.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pwk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		202.865.086	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pwk	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket 5 Paket	21.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pwk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	22.050.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pwk	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	52.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pwk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	155.125.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pwk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	52.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pwk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	21.054.765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan/Material	Pwk	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	52.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Pwk	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang disediakan	1 Paket	55.125,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pwk	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	1 Laporan	17.850.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pwk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	14.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 HOK	110.250.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	10.500.000					
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pwk	Jumlah website yang dipelihara	1 kegiatan	26.250.000					
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan Mebel	Pwk	Jumlah mebeleir yang disediakan	30 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Pwk	Jumlah mebeleir yang disediakan	30 Unit	100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	55,125,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	55,125,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pwk	Jumlah berkas Surat yang disediakan Jumlah Materai Jumlah Pengiriman Surat	150 Berkas 300 Buah 100 Buah	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pwk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pwk	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor yang disediakan Jumlah website yang dipelihara	4 Jenis 1 Keg	330,750,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pwk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jenis 1 Keg	330.750.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pwk	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan Jumlah Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) yang disediakan Jumlah Jasa Tenaga Piket Malam yang disediakan Jumlah Jasa Tenaga PTT yang disediakan Jumlah Premi Asuransi Pegawai Non PNS yang disediakan	195 OB 286 OB 182 OB 26 OB 504 OB	1,159,560,064	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pwk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.159.560.064
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>837.328.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pwk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	82,687,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pwk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	82,687,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pwk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 Unit 50 Unit	132,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pwk	Jumlah pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	132.300.000
	Pemeliharaan Mebel	Pwk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	88,200,000					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	432,352,877	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Jenis	88.200.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	199.606.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	199.606.300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	105.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		Budidaya Ternak Unggas Unggul Jumlah Akseptor IB Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Produksi Hasil Ternak	2,00 Lokasi 2,00 Lokasi 1.788,00 Ekor 1.299,00 Ekor 30,00 Orang 2,00 Produsen 1,00 Lokasi 2,00 Persen		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		Produksi Hasil Ternak; Jumlah Akseptor IB; Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam; Budidaya Ternak Ruminansia Unggul; Budidaya Ternak Unggas Unggul; Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT); Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina;	2 Persen; 1.704 Ekor; 1.273 Ekor; 2 Lokasi; 2 Lokasi; 1 Lokasi; 30 Orang	<b>859.843.000</b>
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>					<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pwk	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	52,438,761	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pwk	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	60.000.000
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>					<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>				
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pwk	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	446,544,489	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pwk	mlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	381.053.000
	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pwk	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	33,075,000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pwk	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	27.562.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>					<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>				
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pwk	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	44,100,000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pwk	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	5 Perusahaan 30 Orang	44.100.000
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Pwk	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	20 Ekor	55,115,000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Pwk	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	20 ekor  2 Kelompok	40.000.000
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pwk	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	2 Laporan	27,562,500	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pwk	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	4 Breeder Ayam	27.562.500
	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>					<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>				
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		330,750,000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15 ekor	250.000
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton	27,562,500	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 tom	33.075.000
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	1 Unit	<b>100.000.000</b>
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>					<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah bangunan RPH yang direhabilitasi	1 Bangunan	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah bangunan RPH yang direhabilitasi	1 Bangunan	100.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Daging) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Susu) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Telur)	0 Kasus 17,00 Kecamatan 70 Persen 40.952,00 Ekor 70 Persen 17,00 Kecamatan 5,00 Ton 2,00 Ton		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Daging) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Susu) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Telur)	0 Kasus 17,00 Kecamatan 70 Persen 40.952,00 Ekor 70 Persen 17,00 Kecamatan 5,00 Ton 2,00 Ton	<b>487.927.637</b>
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pwk	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	109,983,242	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pwk	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	140.000.000
						Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Pwk	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	27,493,567	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	70.012.750
	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	281,138,4876	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	30.000.000
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	21,902,480	Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeuaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	70.000.000
						Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	21.902.480
	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Pwk	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	4,630,500	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	4.630.500
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pwk	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	11,708,550	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	11.708.500
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>					<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				
	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Pwk	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	27,562,500	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Pwk	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	30.000.000
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	110,250,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	107.812.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pwk	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	16,537,470	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pwk	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	16.537.437
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>					<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>				
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pwk	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit	1 Laporan	27,562,437	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pwk	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan`	27.562.437
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	77,175,000					
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Jumlah Kelompok Usaha Peternakan Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi Jumlah Peternak Yang Terlatih	Kelompok 2,00 Penghargaan 25,00 Orang		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Jumlah Kelompok Usaha Peternakan; Jumlah Peternak Yang Terlatih; Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	99 Kelompok; 25 Orang; 2 Penghargaan	<b>40.590.000</b>
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>					<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>				
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pwk	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	570,626,437	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pwk	Jumlah Dokumen Populasi Kelompok Peternakan yang Tersedia Jumlah Kelompok Peternak yang dibina	15 unit	40.590.000

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, dengan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut. Berdasarkan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diampu oleh Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2023 tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Produksi Ikan Hasil Tangkapan; Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking); Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	1.367 Ton; 550.000 Ekor; 53 Kelompok	<b>540.273.160</b>
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>295.489.350</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pwk	Dokumen data potensi perairan darat Kabupaten Purwakarta	1 dokumen	35.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pwk	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Unit	117.081.643
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pwk	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	200 Unit	293.191.517
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pwk	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	35.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 kelompok 5 Kelompok	30.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah temu usaha yang dilaksanakan	3 Kali	30.000.000
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>1.041.100.000</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok	30.000.000



1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pwk	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	30.000.000
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pwk	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	30 orang	25.000.000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pwk	Jumlah Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	30.000.000
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>				
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	30.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	5 Unit	557.400.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	5 Unit	278.700.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	30.000/000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 orang	20.000.000
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	200 sertifikat	10.000.000
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	17 Kecamatan	50.000.000
	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>				

1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	25.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	25.000.000
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Angka Konsumsi Ikan; Produksi Olahan Produk Perikanan; Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan; Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	28,76 kg/kap/th; 100 Ton; 16 Kelompok; 115 Unit	<b>224.550.000</b>
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	22.050.000
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>				
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pwk	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko. Jumlah Kelompok/Unit Pengolah dan Pemasar yang dibina Jumlah Unit Pengolah Ikan yang dilatih	40 unit	60.000.000
	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,25 ton	162.500.000

1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B Opini; 100 Persen	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.357.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pwk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	27.426.700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pwk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	8.643.600
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	12.147.300
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen	Pwk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.258.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Laporan	6.258.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	24.631.600
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pwk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	854 OB	9.708.369.537
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	28.268.750

1	2	3	4	5	6
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pwk	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.268.750
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.512.500
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				
	Analisa dan pengembangan Retrbsi Daerah serta penyusunan kebijakan Retribusi daerah	Pwk	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	200.000.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	pwk	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	20.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pwk	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pwk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.562.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pwk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	22.050.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pwk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	155.125.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pwk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	21.054.765
	Penyediaan Bahan/Material	Pwk	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang disediakan	1 Paket	55.125,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pwk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	14.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pwk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 HOK	110.250.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan Mebel	Pwk	Jumlah mebeleir yang disediakan	30 Unit	100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	55,125,000

1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000
	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pwk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pwk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jenis 1 Keg	330.750.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pwk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1. 159.560.064
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>837.328.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pwk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	82,687,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pwk	Jumlah pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	132.300.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Jenis	88.200.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	199.606.300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pwk	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	105.000.000

1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		Produksi Hasil Ternak; Jumlah Akseptor IB; Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam; Budidaya Ternak Ruminansia Unggul; Budidaya Ternak Unggas Unggul; Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT); Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina;	2 Persen; 1.704 Ekor; 1.273 Ekor; 2 Lokasi; 2 Lokasi; 1 Lokasi; 30 Orang	<b>859.843.000</b>
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pwk	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	60.000.000
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>				
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pwk	mlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	381.053.000
	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pwk	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	27.562.500
	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>				
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pwk	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	5 Perusahaan 30 Orang	44.100.000
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				

1	2	3	4	5	6
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Pwk	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	20 ekor	40.000.000
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pwk	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	4 Breeder Ayam	27.562.500
	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>				
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15 ekor	250.000
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 tom	33.075.000
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	1 Unit	<b>100.000.000</b>
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah bangunan RPH yang direhabilitasi	1 Bangunan	100.000.000
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Daging) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Susu) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Telur)	0 Kasus 17,00 Kecamatan 70 Persen 40.952,00 Ekor 70 Persen 17,00 Kecamatan 5,00 Ton 2,00 Ton	<b>487.927.637</b>
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pwk	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	140.000.000

1	2	3	4	5	6
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Pwk	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 laporan	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	70.012.750
	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	30.000.000
	Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeuaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	70.000.000
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	21.902.480
	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	4.630.500
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	11.708.500
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				
	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Pwk	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	30.000.000
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	107.812.000
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pwk	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	16.537.437
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>				
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pwk	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan`	27.562.437
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Jumlah Kelompok Usaha Peternakan; Jumlah Peternak Yang Terlatih; Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	99 Kelompok; 25 Orang; 2 Penghargaan	<b>40.590.000</b>
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>				
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pwk	Jumlah Dokumen Populasi Kelompok Peternakan yang Tersedia Jumlah Kelompok Peternak yang dibina	15 unit	40.590.000



## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaah Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.

Melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) mengatakan, pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, adapun Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 yaitu ;

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Suharso menuturkan, pemerintah ingin pada 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1 persen. Artinya pada 2023 Indonesia harus menurunkan kemiskinan ekstrem 2,5-3 juta penduduk.
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
- 6) Ekonomi hijau
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Dampak Covid-19 memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Untuk itu perlu adanya langkah extraordinary dari pemerintah untuk melakukan recovery perekonomian. Oleh karena hal itu presiden menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemda memfokuskan kegiatan serta merelokasikan anggaran untuk biaya percepatan penanganan wabah.

Pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Ada 5 program yang disusun oleh pemerintah terkait hal ini, antara lain.

1. Implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor/impor.
2. Digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar Pemerintah saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital.
3. sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi Kereta Api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur.
4. Penguatan kerja sama antardaerah khususnya dalam pemenuhan pangan.
5. Pembentukan holding BUMN Pangan dalam penguatan Ekosistem Pangan Nasional.

Sementara itu pemerintah menyiapkan 5 stimulus dan insentif untuk sektor pertanian dan perikanan. Adapun hal ini ditujukan untuk tetap menjaga kinerja kedua sektor ini. Kelima stimulus dan insentif itu antara lain.

1. Program Padat Karya Pertanian
2. Program Padat Karya Perikanan
3. Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian
4. Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat
5. Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Berguli

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menyebutkan Visi Pembangunan Nasional yaitu : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam tiga dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia, meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan, meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di Tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. Rasio Gini sebesar 0,36;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah. Sementara itu, tema yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Adapun prioritas nasional dan program prioritas dalam rancangan awal RKP 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2019

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1	Pembangunan manusia	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2	Penguatan konektivitas	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonom	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
5	Stabilitas Keamanan Nasional	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

#### 2. Tujuan

1. Meningkatkan penyediaan pangan hewani dengan mengoptimalkan Pemanfaatanpotensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan.
2. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan.
3. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner

#### 2. Sasaran

1. Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan
3. Berkembangnya kelompok/kelembagaan perikanan dan peternakan
4. Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum
5. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Kesmavet

Tabel 22. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Renja Tahun 2021 Berdasarkan RENSTRA 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1.	Meningkatnya penyediaan	Meningkatnya penyediaan pangan	Penyediaan produksi	

	pangan hewani dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan	dan gizi asal ternak dan ikan	untuk konsumsi (kg/kap/tahun) :	
			- Daging	10,61
			- Telur	7,17
			- Susu	0,56
			- Ikan	29,34
2.	Meningkatnya usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan	Laju produksi perikanan budidaya (14%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi benih ikan UPR (889.470.720 ekor)</li> <li>- Produksi Ikan Konsumsi (14.279 Ton)</li> <li>- Produksi Ikan Hias (162.432ekor)</li> <li>- Produksi Benih UPTD BBI (6.320.000 ekor)</li> <li>- Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi (4 hektar)</li> </ul>
			Laju produksi perikanan tangkap (7,5%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi ikan hasil tangkapan (1.367 ton)</li> <li>- Jumlah ikan yang ditebarkan (Restocking) (500.000 ekor)</li> </ul>
			Laju produksi peternakan (2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya Ternak Ruminansia unggul (2 lokasi)</li> <li>- Budidaya Ternak Unggas unggul (2 Lokasi)</li> <li>- Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) (1lokasi)</li> </ul>
			Laju populasi ternak (2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi hasil ternak (2%)</li> <li>- Jumlah Akseptor IB (1.622 ekor)</li> <li>- Jumlah kelahiran sapi potong hasil IB dan Kawin alam (1.248 ekor)</li> </ul>



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
		Berkembangnya kelompok/kelembagaan perikanan dan peternakan	Laju Aktivitas usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan (2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Konsumsi Ikan (28,76 kg/kap/th)</li> <li>- Produksi Olahan Produk Perikanan (95 ton)</li> <li>- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (124 Kelompok)</li> <li>- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (51 Kelompok)</li> </ul>
			Meningkatnya jumlah pelaku usaha pemasaran produk hasil peternakan (2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kelompok Usaha Peternakan (98 kelompok)</li> <li>- Jumlah pemasukan dan Pengeluaran Ternak (lalu lintas ternak) (38.195 ekor)</li> <li>- peningkatan penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) (17 kecamatan)</li> </ul>
			Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani pelaku agribisnis (100%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peternak yang terlatih (25 orang)</li> <li>- Jumlah pelaku peternak yang berpestasi (2 penghargaan)</li> </ul>
		Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum	Pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum (17 Kec) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya (17 kecamatan)</li> </ul>	
3.	Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner	Terkendalnya Penyakit hewan menular Strategis (PHMS) dan Kesmavet	Status kesehatan hewan bebas penyakit hewan menular	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pelaku usaha penyedia dan peredaran obat hewan yg dibina (30 orang)</li> <li>- Jumlah produsen pakan yang dibina (2 produsen)</li> <li>- Tersedianya RPH yang memenuhi persyaratan teknis (1 unit)</li> <li>- Persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik (70 %)</li> <li>- Persentase ternak yang diobati (Non Zoonosis) dari populasi ternak (20 %)</li> <li>- Status Bebas Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (0 kasus)</li> <li>- Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang ditangani kesehatannya (429 ekor)</li> <li>- Produk hasil ternak yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (3 jenis)</li> </ul>

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program pembangunan perikanan dan peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, diarahkan kepada peningkatan penyediaan pangan dan gizi masyarakat, pengembangan usaha dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan peternakan. Program Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta berdasarkan kewenangan dan urusan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut ;

- I 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Material
  - Fasiltasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektornik pada SKPD
- 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya
- 3.25.01.2.08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor

- 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya  
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- II 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**  
**3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota**  
 Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan  
 Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap  
 Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
- 3.25.03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  
 Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil  
 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha
- III 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**  
**3.25.04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL**  
 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil  
 Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil  
 Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha  
 Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidaya Ikan**  
 Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota  
 Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota  
 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota  
 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah  
 Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat  
 Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat
- 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**  
**3.27,01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**  
 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah  
 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

- IV 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
- 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**  
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Kewenangan Kabupaten / Kota**  
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman
- 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**  
3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak  
3.27.02.2.05.03 Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**  
3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain  
3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- V 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
- 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian**  
3.27.03.2.02.07 Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
- 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis  
3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
- 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**  
3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan  
3.27.04.2.02.02 Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeuaran Hewan dan Produk Hewan  
3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium  
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**  
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk hewan  
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  
3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis**

		<b>Kesejahteraan Hewan</b>
	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
	<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUH PERTANIAN</b>
	<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>
	<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>VI</b>	<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
	<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genanangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>
	<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>VII</b>	<b>03.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
	<b>03.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>
	03.25.06.2.01.01	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	<b>03.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>
	03.25.06.2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
	<b>03.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	03.25.06.2.03.01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Renja Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta

Nama SKPD : Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Produksi Ikan Hasil Tangkapan; Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking); Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina		1.367 Ton; 550.000 Ekor; 53 Kelompok	<b>540.273.160</b>				
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>295.489.350</b>				
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen data potensi perairan darat Kabupaten Purwakarta	Pwk	1 dokumen	35.000.000				
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Pwk	10 Unit	117.081.643				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Pwk	200 Unit	293.191.517				
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pwk	40 Orang	35.000.000				
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		5 kelompok  5 Kelompok	30.000.000				
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah temu usaha yang dilaksanakan		3 Kali	30.000.000				

1	2	4	3	5	6				
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>1.041.100.000</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>								
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pwk	10 kelompok	30.000.000				
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pwk	4 Kelompok	30.000.000				
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Pwk	30 orang	25.000.000				
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pwk	25 orang	30.000.000				
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>								
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Pwk	1 Dokumen	30.000.000				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	Pwk	5 Unit	557.400.000				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	Pwk	5 Unit	278.700.000				
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pwk	1 Dokumen	30.000/000				
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	100 orang	20.000.000				
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pwk	200 sertifikat	10.000.000				



1	2	4	3	5	6				
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya		17 Kecamatan	50.000.000				
	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>								
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Pwk	1 Dokumen	25.000.000				
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Pwk	1 Dokumen	25.000.000				
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Angka Konsumsi Ikan; Produksi Olahan Produk Perikanan; Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan; Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		28,76 kg/kap/th; 100 Ton; 16 Kelompok; 115 Unit	<b>224.550.000</b>				
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>								
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Pwk	1 Dokumen	22.050.000				
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>								
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan RisikoJumlah Kelompok/Unit Pengolah dan Pemasar yang dibina Jumlah Unit Pengolah Ikan yang dilatih	Pwk	40 unit	60.000.000				
	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>								
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	3,25 ton	162.500.000				

1	2	4	3	5	6				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		B Opini; 100 Persen					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	4 Dokumen	40.357.300				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pwk	2 dokumen	27.426.700				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pwk	1 dokumen	8.643.600				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pwk	1 dokumen	12.147.300				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pwk	1 dokumen	6.258.100				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3 Laporan	6.258.100				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	24.631.600				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Pwk	854 OB	9.708.369.537				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	31.750.000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	28.268.750				

1	2	4	3	5	6				
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pwk	1 Dokumen	8.268.750				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pwk	4 Laporan	5.512.500				
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>								
	Analisa dan pengembangan Retrbsi Daerah serta penyusunan kebijakan Retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Pwk	1 dokumen	200.000.000				
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	pwk	1 Laporan	20.000.000				
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pwk	1 Unit	30,000,000				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pwk	4 Paket	27.562.500				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	150.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pwk	3 Paket	22.050.000				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pwk	8 Paket	155.125.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pwk	6 Paket	21.054.765				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang disediakan	Pwk	1 Paket	55.125,000				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pwk	12 Bulan	14.750.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pwk	30 HOK	110.250.000				
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleir yang disediakan	Pwk	30 Unit	100.000.000				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pwk	8 Unit	55,125,000				

1	2	4	3	5	6				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pwk	10 Unit	100.000.000				
	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pwk	1 Laporan	4.000.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pwk	4 Jenis 1 Keg	330.750.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pwk	1 laporan	1.159.560.064				
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>837.328.000</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pwk	6 unit	82,687,500				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pwk	50 Unit	132.300.000				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pwk	8 Jenis	88.200.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pwk	8 unit	199.606.300				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pwk	8 unit	105.000.000				

1	2	4	3	5	6				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>								
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produksi Hasil Ternak; Jumlah Akseptor IB; Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam; Budidaya Ternak Ruminansia Unggul; Budidaya Ternak Unggas Unggul; Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT); Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina;		2 Persen; 1.704 Ekor; 1.273 Ekor; 2 Lokasi; 2 Lokasi; 1 Lokasi; 30 Orang	<b>859.843.000</b>				
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>								
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pwk	1 Laporan	60.000.000				
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>								
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	mlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pwk	1 Dokumen	381.053.000				
	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>								
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Pwk	1 Laporan	27.562.500				
	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>								
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Pwk	5 Perusahaan 30 Orang	44.100.000				
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>								

1	2	4	3	5	6				
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Pwk	20 ekor	40.000.000				
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Pwk	4 Breeder Ayam	27.562.500				
	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>								
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		15 ekor	250.000				
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		1 ton	33.075.000				
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis		1 Unit	<b>100.000.000</b>				
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>								
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah bangunan RPH yang direhabilitasi		1 Bangunan	100.000.000				
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Daging) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Susu) Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (Telur)		0 Kasus 17,00 Kecamatan 70 Persen 40.952,00 Ekor 70 Persen 17,00 Kecamatan 5,00 Ton 2,00 Ton	<b>487.927.637</b>				

1	2	4	3	5	6				
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pwk	1 Laporan	140.000.000				
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Pwk	1 laporan					
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	1 Laporan	70.012.750				
	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pwk	1 Laporan	30.000.000				
	Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeuaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	1 Laporan	70.000.000				
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	1 Laporan	21.902.480				
	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		1 Laporan	4.630.500				
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1 Laporan	11.708.500				
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>								
	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pwk	1 Laporan	30.000.000				
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pwk	1 Laporan	107.812.000				
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pwk	1 Dokumen	16.537.437				
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>								

1	2	4	3	5	6				
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pwk	1 Laporan`	27.562.437				
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan; Jumlah Peternak Yang Terlatih; Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi		99 Kelompok; 25 Orang; 2 Penghargaan	<b>40.590.000</b>				
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>								
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Populasi Kelompok Peternakan yang Tersedia Jumlah Kelompok Peternak yang dibina	Pwk	15 unit	40.590.000				



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 disusun sebagai acuan dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami berharap agar perencanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 dapat terlaksana sesuai harapan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta diperlukan komitmen dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat secara efektif, efisien, terintegrasi dan sinkronisasi dengan sektor lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah. Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2023.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Rencana Kerja ini menyajikan perencanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 1 (satu) tahun ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi dari masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) mengacu kepada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD yang pada akhirnya dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) .

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelayanan bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2022

KEPALA DINAS  
PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Ir. BUDHI SUPRIYADI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620908 199003 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN LALU</b> .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2019 (n-2).....	53
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.....	65
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	66
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	87
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	97
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	97
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	103
3.3. Program dan Kegiatan	106
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	110
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	121
<b>LAMPIRAN</b>	122

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel1.	Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.....	10
Tabel 2.	Jumlah dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2021.....	11
Tabel 3.	Jumlah dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019.....	12
Tabel 4.	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Nelayan Tangkap Tahun 2021. ....	20
Tabel 5.	Luas Potensi Perairan Umum di Kabupaten Purwakarta.....	20
Tabel 6.	Penebaran benih ikan (restocking) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021. ....	21
Tabel 8.	Lokasi dan Toko pengawasan peredaran obat hewan Tahun 2021. ....	25
Tabel 9.	Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun 2021.....	27
Tabel 10	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020 (n-1) Kabupaten Purwakarta.....	33
Tabel 11.	Penyediaan Produksi Pangan Hewani Tahun 2021. ....	57
Tabel 12.	Jumlah Produksi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun 2018 (kg). ....	58
Tabel 13.	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Potensi Produksi Pangan Hewani Tahun 2021.....	59
Tabel 14.	Produksi Ikan Tahun 2021 berdasarkan jenis ikan .....	60
Tabel 15.	Produksi Ikan Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 berdasarkan jenis usaha.....	61
Tabel 16.	Produksi ikan Kolam Budidaya Tahun 2021,.....	61
Tabel 17.	Produksi Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun 2021. ....	62
Tabel 18.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta.....	63
Tabel 19.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.....	73

Tabel 20.	Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023. ....	88
Tabel 21.	Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2023. ....	102
Tabel 22.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Renja Tahun 2023 Berdasarkan RENSTRA 2018-2023.....	103
Tabel 23.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta. ....	111

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
Jalan Suradiredja No. 28 Purwakarta 41115  
PURWAKARTA**

